



Analisis Situasi
PEMBANGUNAN MANUSIA
Kabupaten Magelang

2013



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**



Analisis Situasi
PEMBANGUNAN MANUSIA
Kabupaten Magelang

2013

Judul Buku :

**ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN MAGELANG 2013**

Nomor Publikasi :

Ukuran Buku : Kwarto (21 x 28 cm)

Jumlah Halaman : ix+66 hal

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Diterbitkan Oleh :

BAPPEDA Kabupaten Magelang

Boleh dikutip dengan menyebut nama sumbernya

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat telah memberi kewenangan yang besar kepada daerah. Dengan tipe desentralisasi yang bersifat devolusi, maka pemerintah daerah telah diserahkan kewenangan yang cukup kuat untuk mengambil keputusan, keuangan dan manajemen terhadap pemerintahan daerahnya sendiri. Pemerintah daerah juga diberi kesempatan untuk memilih pemimpinnya sendiri, meningkatkan pendapatan daerahnya dan membuat keputusan investasinya.

Dengan kewenangan pemerintah daerah yang begitu besar, maka masalah berikutnya yang akan muncul diantaranya adalah masalah pemerataan. Kabupaten/kota yang memiliki sumber daya fisik/alam dan sumber daya manusia yang lebih besar akan maju jauh lebih cepat dibandingkan dengan daerah lainnya.

Salah satu cara yang dapat menjamin bahwa dalam otonomi daerah, pembangunan berjalan merata untuk semua kepentingan rakyat Indonesia adalah dengan membuat kesepakatan sosial (*social compact*) yaitu suatu kesepakatan bahwa semua rakyat Indonesia berhak atas suatu standar pembangunan manusia. Rakyat Indonesia berhak untuk bisa membaca dan menulis, berhak untuk hidup sehat, berhak untuk mendapatkan penghasilan yang layak, berhak untuk mendapatkan rumah yang memadai dan berhak untuk hidup dengan damai dan aman.

Hak-hak tersebut harus dirasakan oleh semua rakyat di berbagai daerah. Ini bukan sebagai bentuk penyeragaman. Indonesia akan tetap sebagai negara yang kaya akan keragaman, tetapi pada saat yang sama juga harus memiliki kerangka atas hak-hak dan standar yang disepakati bersama. Dengan adanya kesepakatan tentang pembangunan manusia, keragaman budaya daerah dan etnis tidak akan menjadi

elemen yang dapat memecah belah, bahkan akan menjadi komponen yang dapat memperkuat dan menyatukan bangsa. Bentuk-bentuk kesepakatan yang dikutip dalam “Laporan Pembangunan Manusia Indonesia” antara lain :

1. Pernyataan misi (*mission statement*) yaitu menekankan pentingnya pembangunan manusia dan memperjelas perlunya kemitraan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dengan pernyataan misi ini, maka akan ada suatu ketetapan pentingnya pembangunan manusia baik sebagai proses maupun sebagai akhir. Kemitraan pemerintah pusat dan daerah diperlukan antara lain untuk memecahkan persoalan otonomi daerah yang dapat berupa pendistribusian sumber daya dan pembagian keuangan yang harus dibagi antara pusat dan daerah.

2. Standar pembangunan manusia (*human development standards*) yaitu menetapkan tingkatan yang harus dicapai oleh semua daerah.

Standar minimal yang dapat dibuat adalah untuk menarik daerah-daerah yang tertinggal untuk mencapai rata-rata nasional. Standar universalnya dapat mengikuti standar internasional. Contohnya : pada tahun 2015 angka wajib belajar sudah 100% (hasil konferensi PBB tahun 1990).

3. Diskusi publik (*public deliberations*) yaitu memperkuat norma dan tata nilai demokrasi, tukar menukar ide dan informasi antar daerah.

Hasil kesepakatan tersebut adalah dapat memperkuat persatuan nasional, konsolidasi bagi terciptanya demokrasi yang lebih baik dan dapat memacu para pembuat kebijakan dan pejabat daerah untuk memperbaharui komitmen mereka terhadap pembangunan manusia.

Mengingat pentingnya Analisis Situasi Pembangunan Manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan informasi terkait capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang dalam hal pembangunan manusia yang dikemas dalam publikasi dengan judul “Analisis Situasi Pembangunan Manusia

Kabupaten Magelang Tahun 2013” dengan indikator berupa Indeks Pembangunan Manusia.

1.2. Tujuan

Adapun beberapa tujuan disusunnya buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia Tahun 2013 diantaranya adalah:

1. Menyajikan informasi mengenai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2013
2. Menyajikan data IPM Kabupaten Magelang Tahun 2013
3. Menyajikan ulasan deskriptif IPM 2013 Kabupaten Magelang
4. Menyajikan indikator input maupun dampak dari hasil pembangunan manusia di Kabupaten Magelang yang terangkum dalam Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) Tahun 2013
5. Membandingkan percepatan pembangunan manusia Kabupaten Magelang dengan daerah tetangganya dengan menggunakan indikator IPM.

Dengan disajikannya data pembangunan manusia, diharapkan semakin memantapkan kebijakan pembangunan yang berwawasan pembangunan manusia yang seiring dengan semakin kuatnya kapasitas kemampuan penentu pengambil kebijakan dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di daerah. Data tersebut juga dapat dijadikan dasar untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan manusia yang sudah dilaksanakan.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan Analisis Situasi Pembangunan Manusia Tahun 2013 meliputi kondisi perekonomian, kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan dan kesehatan yang merupakan komponen-komponen yang dijadikan indikator dalam penghitungan IPM. Komponen-komponen yang dijadikan indikator tersebut yaitu

Angka Harapan Hidup Ketika Lahir, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, dan Pengeluaran Per Kapita.

1.4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam analisa ini bersumber dari :

1. Data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh BPS setiap tahunnya.
2. Data publikasi BPS yang berasal dari hasil survei-survei lainnya.
3. Data sekunder yang berasal dari instansi/dinas/lembaga lain yang diperlukan.

Bab II Gambaran Umum

2.1. Keadaan Geografis

Kabupaten Magelang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak antara 110°01'51" dan 110°26'58" Bujur Timur dan antara 7°19'33" dan 7°42'16" Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 360 meter dari permukaan laut. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, sebelah Timur Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, sebelah Selatan Kabupaten Purworejo dan DI Yogyakarta, sebelah Barat Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo dan di Tengah terletak Kota Magelang.

Ibukota Kabupaten Magelang terletak di Kota Mungkid, dengan luas wilayah Kabupaten 108.573 Ha atau sekitar 3,34 persen dari luas provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kabupaten Magelang dibagi menjadi 21 kecamatan dan terdiri dari 372 desa/kelurahan. Bila ditinjau berdasarkan Luas Tanah Menurut Penggunaannya di wilayah Kabupaten Magelang sejak tahun 2009 hingga tahun 2013, komposisi antara Tanah Sawah dan Tanah Kering mengalami pergeseran. Pada tahun 2009, luas Tanah Sawah tercatat 37 221 Ha (34,28 %) dan luas Tanah Kering tercatat 71 352 Ha (65,72 %), sedangkan pada tahun 2013 luas Tanah Sawah 36 892 Ha (33,98%) dan luas Tanah Kering 71 681 Ha (66,02%). Salah satu penyebab adanya pergeseran ini yaitu terjadinya perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian menjadi pemukiman, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

2.2. Kependudukan

Demografi atau sering juga disebut statistik kependudukan merupakan gambaran tentang struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi jumlah, penyebaran dan komposisi penduduk. Struktur penduduk ini selalu berubah-

ubah dan perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi penduduk.

Perubahan struktur penduduk ini membutuhkan proses panjang, selama proses tersebut berlangsung, karakteristik penduduk mengalami berbagai perubahan baik dalam variabel demografi maupun sosial ekonomi dan budaya. Pemahaman mengenai karakteristik penduduk dan berbagai perubahan yang dialaminya menjadi sangat penting, mengingat peran penduduk sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Penduduk sebagai subyek berarti penduduk akan melaksanakan dan mengisi pembangunan, sedangkan sebagai obyek berarti penduduk akan menerima segala manfaat dan konsekuensi hasil-hasil pembangunan.

Hasil-hasil pembangunan masa lalu akan tercermin dalam karakteristik penduduk di masa sekarang dan selanjutnya pembangunan di masa mendatang merupakan cerminan dari karakteristik penduduk saat ini dan perkiraan perubahannya di masa mendatang. Perencanaan pembangunan yang didasarkan atas kondisi demografi penduduk, sangat diperlukan untuk lebih menjamin tercapainya tujuan pembangunan dan menekan efek negatif dari pembangunan itu sendiri.

2.2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk disuatu daerah dipengaruhi oleh besarnya kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Penduduk akan bertambah jumlahnya jika ada penduduk yang lahir dan yang datang, dan penduduk akan berkurang bila ada penduduk yang mati dan meninggalkan daerah tersebut.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010, jumlah penduduk Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kabupaten Magelang berdasarkan hasil Sensus Penduduk secara berurutan masing-masing sebesar 820.310 jiwa, 935.191 jiwa, 1.016.635 jiwa, 1.105.722 jiwa dan 1.181.916 jiwa.

Grafik 2.1
Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Magelang, 2010 - 2013



Sumber data: BPS Kabupaten Magelang

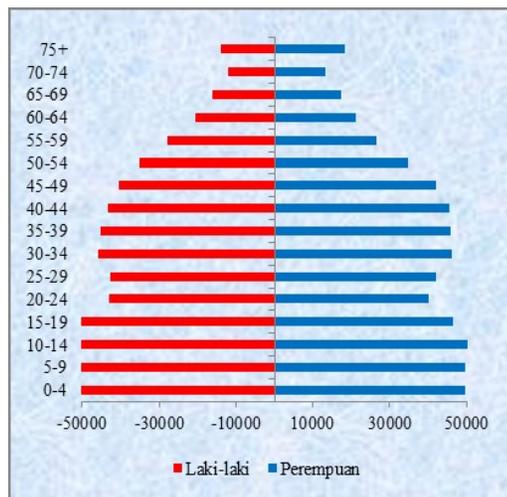
Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, terlihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan. Dari grafik 2.1 juga terlihat bahwa komposisi jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dibanding penduduk perempuan. Pada tahun 2012, jumlah penduduk laki-laki sebesar 606.914 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 602.461 jiwa, mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi sebesar 613.112 jiwa untuk penduduk laki-laki dan 608.569 jiwa untuk penduduk perempuan.

Untuk membandingkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Magelang per tahun, digunakan laju pertumbuhan aritmatik. Tingkat pertumbuhan penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Magelang tahun 2013 lebih rendah dibanding tahun 2012 yakni sebesar 1,00 persen. Ini menunjukkan bahwa penambahan penduduk di tahun 2013 ini berhasil dikendalikan.

2.2.2 Komposisi Penduduk Kabupaten Magelang

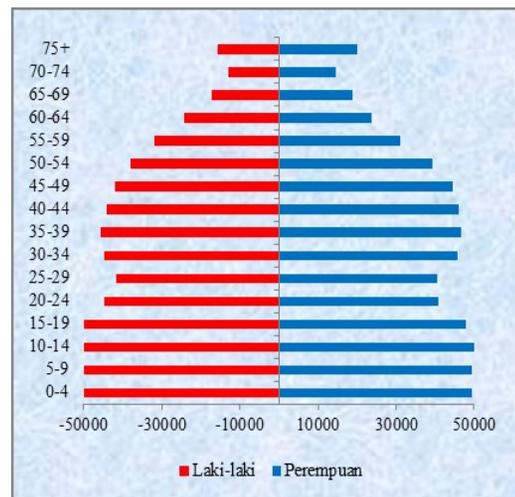
Komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk yang dibuat berdasarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik-karakteristik yang sama. Berbagai macam komposisi penduduk dapat dibuat, namun pada bab ini hanya akan dibahas tentang komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin Kabupaten Magelang digambarkan dalam piramida penduduk untuk lebih memperjelas dalam pemahamannya. Piramida disajikan dalam rentang waktu lima tahunan. Setiap batang piramida, mewakili satu kohor penduduk yang berasal dari kohor kelahiran yang sama, yang disusun menurut kelompok umur lima tahunan. Dalam perkembangannya, kohor tersebut pasti mengalami berbagai perubahan demografi baik itu kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*) dan perpindahan penduduk (*migrasi*). Komponen fertilitas hanya akan mempengaruhi penduduk pada dasar piramida (kelompok umur 0 – 4 tahun), sedangkan komponen mortalitas dan migrasi dapat berpengaruh pada seluruh kelompok umur.

Grafik 2.2
Piramida Penduduk, 2010



Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

Grafik 2.3
Piramida Penduduk, 2013



Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

Secara umum bentuk piramida penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2010 dan 2013 menunjukkan kesamaan pola. Dilihat dari dua piramida diatas, untuk kelompok umur 0-19 tahun, mempunyai panjang batang cenderung sama dan lebih panjang dibanding kelompok umur diatasnya. Kondisi ini menjelaskan struktur penduduk pada dua tahun tersebut, jumlah penduduk mudanya cenderung lebih besar.

Pada tahun 2010 terjadi penurunan jumlah penduduk di kelompok umur (20-24) tahun dan kemudian meningkat lagi di kelompok umur (25-29) tahun. Hal ini dimungkinkan pengaruh migrasi keluar pada kelompok umur (20-24) tahun untuk mencari pekerjaan dan migrasi masuk pada kelompok umur (25-29) tahun untuk berkeluarga. Pola tersebut hampir sama dengan penduduk pada kelompok umur (20-24) tahun dan umur (25-29) di tahun 2013.

Untuk struktur penduduk di usia produktif memperlihatkan persamaan bentuk di kedua piramida diatas. Pada dua tahun tersebut terlihat bahwa kelompok penduduk usia produktif mulai mengecil dibanding kelompok usia muda. Dan terus mengecil pada penduduk kelompok usia tua.

Rasio Jenis Kelamin (*sex ratio*) adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan dikalikan 100. *Sex Ratio* pada kohor kelahiran (0-4) tahun selalu bernilai di atas 100, yang berarti lebih banyak penduduk laki-laki daripada penduduk perempuan. Hal tersebut dikarenakan peluang kelahiran bayi laki-laki lebih besar daripada bayi perempuan.

Untuk kelompok umur 15-64 tahun, *sex ratio* berdasarkan kelompok umur tersebut sangat dipengaruhi oleh peristiwa migrasi penduduk. *Sex ratio* yang lebih kecil dari 100 menunjukkan bahwa pada kelompok umur tersebut migrasi keluar dari Kabupaten Magelang banyak dilakukan oleh penduduk laki-laki atau banyak migrasi masuk dari penduduk perempuan. Hal ini mulai terlihat pada kelompok umur (30-34) sampai kelompok umur (45-49) tahun. Akan tetapi, pada kelompok umur (50-54)

tahun terjadi perbedaan pola antara tahun 2010 dengan tahun 2013. Bila pada tahun 2010 untuk kelompok umur tersebut, kecenderungan penduduk laki-laki lebih banyak namun pada tahun 2013 berubah menjadi penduduk perempuan yang lebih banyak yaitu terlihat dari *sex ratio* yang lebih kecil dari 100. Perbedaan juga pada kelompok umur (60-64), di tahun 2013 *sex rationya* menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk wanita.

Selain dipengaruhi oleh migrasi, variasi *sex ratio* menurut kelompok umur pada dasarnya disebabkan oleh peristiwa kematian penduduk. Seiring bertambahnya usia, peluang kematian penduduk laki-laki akan lebih besar dibanding penduduk perempuan, hal ini terlihat pada Tabel 2.1 dimana nilai *sex ratio* pada kelompok umur 60+ selalu lebih kecil dari 100, yang berarti jumlah penduduk perempuan pada kelompok umur tua selalu lebih besar daripada penduduk laki-laki. Hal tersebut berkaitan dengan angka harapan hidup (e_0) perempuan yang lebih tinggi dari laki-laki.

Tabel 2.1
Ratio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Magelang
Menurut Kelompok Umur, 2010 dan 2013

Kelompok Umur	Tahun	
	2010	2013
(1)	(2)	(3)
0 – 4	103,13	103,22
5 – 9	105,12	105,28
10 – 14	107,89	107,70
15 – 19	108,31	110,09
20 – 24	106,78	109,64
25 – 29	101,51	102,92
30 – 34	99,35	97,55
35 – 39	98,04	98,04
40 – 44	95,45	95,87
45 – 49	95,79	94,50
50 – 54	101,19	96,76
55 – 59	104,86	102,59
60 – 64	97,06	102,88
65 – 69	92,64	92,30
70 – 74	88,56	90,10
75+	76,82	78,04

Sumber: BPS Kabupaten Magelang

Penduduk selain dikategorikan dalam kelompok umur lima tahunan, juga dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur, yaitu kelompok umur muda (0-14) tahun, kelompok usia produktif (15-64) tahun, dan kelompok umur tua (65+) tahun. Perbandingan jumlah penduduk pada ketiga kelompok umur tersebut dapat dilihat dari nilai angka ketergantungan total (*dependency ratio total*). Secara kasar dapat diartikan bahwa *dependency ratio* merupakan salah satu indikator maju mundurnya ekonomi suatu wilayah, dengan kata lain semakin tinggi *dependency ratio* semakin rendah kemakmuran suatu wilayah. Untuk memperoleh *dependency ratio total*, terlebih dahulu harus diketahui *dependency ratio* penduduk muda dan *dependency ratio* penduduk tua.

Tabel 2.2
Dependency Ratio Penduduk Kabupaten Magelang, 2010 dan 2013

Tahun	Jenis Kelamin	Dependency Ratio Muda	Dependency Ratio Tua	Dependency Ratio Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	L	40,01	10,64	50,65
	P	38,28	12,53	50,82
2013	L	38,24	11,24	49,48
	P	36,62	13,14	49,76

Sumber data: BPS Kabupaten Magelang

Dependency ratio penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2010 dan tahun 2013 mempunyai pola yang sama untuk penduduk menurut jenis kelamin dimana penduduk perempuan mempunyai *Dependency Ratio* Muda lebih kecil dibanding penduduk laki-laki. Sedangkan untuk *Dependency Ratio* Tua, penduduk perempuan mempunyai angka lebih besar. Kondisi ini disebabkan karena di usia tua jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki.

Angka *Dependency Ratio* Total di tahun 2013 tercatat penduduk perempuan mempunyai angka *dependency ratio* sebesar 49,76 dan penduduk laki-laki 49,48. Ini dapat diartikan bahwa dari setiap 100 orang usia produktif (15-64) tahun harus

menanggung 50 orang penduduk perempuan usia non produktif (0-14 dan 65+) tahun dan menanggung 49 orang penduduk laki-laki. Dari Tabel 2.2 terlihat bahwa terjadi penurunan *dependency ratio* penduduk muda, sementara *dependency ratio* penduduk tua cenderung meningkat. Kondisi ini tentu saja merupakan suatu gambaran yang menggembirakan, yang mengidentifikasi rendahnya angka kelahiran dan rendahnya kematian penduduk usia lansia serta meningkatnya angka harapan hidup di Kabupaten Magelang selama kurun waktu tersebut.

2.2.3 Kepadatan Penduduk

Luas wilayah Kabupaten Magelang adalah 1 085,73 Km² dengan kepadatan penduduk pada tahun 2013 sebesar 1 125 jiwa per Km². Kecamatan Muntilan dan Kecamatan Mertoyudan merupakan Kecamatan dengan kepadatan diatas 2 000 jiwa per Km²-nya. Urutan terpadatnya adalah Kecamatan Muntilan (2 702 jiwa per Km²) dan selanjutnya adalah Kecamatan Mertoyudan (2 420 jiwa per Km²). Kecamatan Mungkid menempati urutan ketiga dengan kepadatan sebesar 1 914 jiwa per Km². Sementara itu Kecamatan Kajoran yang menyandang predikat kecamatan terluas di Kabupaten Magelang mempunyai kepadatan terendah yakni dengan luas wilayah 83,41 Km² mempunyai kepadatan sebesar 628 jiwa per Km². Kecamatan Ngluwar dengan luas wilayah terkecil di Kabupaten Magelang menempati urutan ke tujuh dalam urutan kepadatan penduduk yakni dengan luas wilayah 22,44 Km² mempunyai kepadatan sebesar 1 363 jiwa per Km².

Bila dilihat dari distribusi penduduknya, tiga kecamatan yang mempunyai sumbangan terbesar terhadap total penduduk Kabupaten Magelang berturut-turut adalah Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Grabag dan Kecamatan Secang masing-masing sebesar 8,89%, 6,88% dan 6,40%. Dan Kecamatan Ngluwar dengan sumbangan terendah memberikan sumbangan sebesar 2,50% terhadap jumlah penduduk Kabupaten Magelang secara keseluruhan.

Tabel 2.3
Distribusi dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang, 2013

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Distribusi Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk Per Km ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Salaman	68,87	68 016	5,57	988
2	Borobudur	54,55	57 193	4,68	1048
3	Ngluwar	22,44	30 590	2,50	1363
4	Salam	31,63	45 896	3,76	1451
5	Srumbung	53,18	46 747	3,83	879
6	Dukun	53,4	44 359	3,63	831
7	Muntilan	28,61	77 306	6,33	2702
8	Mungkid	37,4	71 574	5,86	1914
9	Sawangan	72,37	55 458	4,54	766
10	Candimulyo	46,95	46 963	3,84	1000
11	Mertoyudan	45,35	109 753	8,98	2420
12	Tempuran	49,04	48 003	3,93	979
13	Kajoran	83,41	52 403	4,29	628
14	Kaliangkrik	57,34	53 875	4,41	940
15	Bandongan	45,79	56 156	4,60	1226
16	Windusari	61,65	48 144	3,94	781
17	Secang	47,34	78 230	6,40	1653
18	Tegalrejo	35,89	55 332	4,53	1542
19	Pakis	69,56	53 330	4,37	767
20	Grabag	77,16	83 878	6,87	1087
21	Ngablak	43,8	38 475	3,15	878
Jumlah		1 085,73	1 221 681	100,00	1 125

Sumber data: BPS Kabupaten Magelang

2.3. Kondisi Ekonomi

Perekonomian yang semakin baik akan semakin meningkatkan upaya dari masyarakat terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia. Perekonomian yang baik dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya. Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi dan bernilai positif akan semakin baik perekonomian suatu

daerah. Dengan perekonomian yang baik diharapkan semakin banyak uang yang diperoleh penduduk sebagai pendapatan, maka semakin banyak uang yang dapat dibelanjakan sehingga dapat menaikkan besaran pendapatan regional. Tabel-tabel berikut disajikan tinjauan perekonomian Kabupaten Magelang.

Tabel 2.4
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000
Serta Perkembangannya di Kabupaten Magelang, 2009 - 2013

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000	
	Nilai (Juta Rp)	Perkembangan (%)	Nilai (Juta Rp)	Perkembangan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2009	7 151 057,51	265,80	3 938 764,68	146,40
2010	8 022 322,50	298,18	4 116 390,07	153,00
2011	8 770 808,70	326,00	4 292 354,45	159,54
2012	9 736 556,38	361,90	4 542 888,66	168,85
2013	10 814 289,76	401,95	4 797 319,01	178,31

Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

Dari tabel 2.4 terlihat bahwa PDRB Kabupaten Magelang terus meningkat besarnya selama lima tahun terakhir (2009-2013). Dari sebesar 7 151,06 milyar rupiah PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku tahun 2009 hingga mencapai 10 814,29 milyar rupiah pada tahun 2013.

Demikian juga perkembangan PDRB perkapita di Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku, menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Dimana PDRB perkapita juga dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Pada tahun 2013 PDRB perkapita Kabupaten Magelang sebesar Rp. 7 984 900,72 atau naik sebesar 10,86 persen dari tahun 2012. Demikian juga PDRB perkapita atas dasar harga konstan, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir selalu mengalami kenaikan meskipun kenaikannya tidak sebesar harga berlaku.

Tabel 2.5
PDRB Perkapita Kabupaten Magelang, 2009 - 2013

Tahun	PDRB per kapita (Rp)		Pertumbuhan (%)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2009	6 084 654,82	3 351 395,72	7,89	4,07
2010	6 784 073,12	3 481 023,26	11,49	3,87
2011	7 371 214,15	3 607 405,54	8,65	3,63
2012	7 984 900,72	3 725 600,05	8,33	3,28
2013	8 851 975,08	3 926 818,06	10,86	5,40

Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

Tabel 2.6
Pertumbuhan Sektor Ekonomi di Kabupaten Magelang, 2009 - 2013 (Persen)

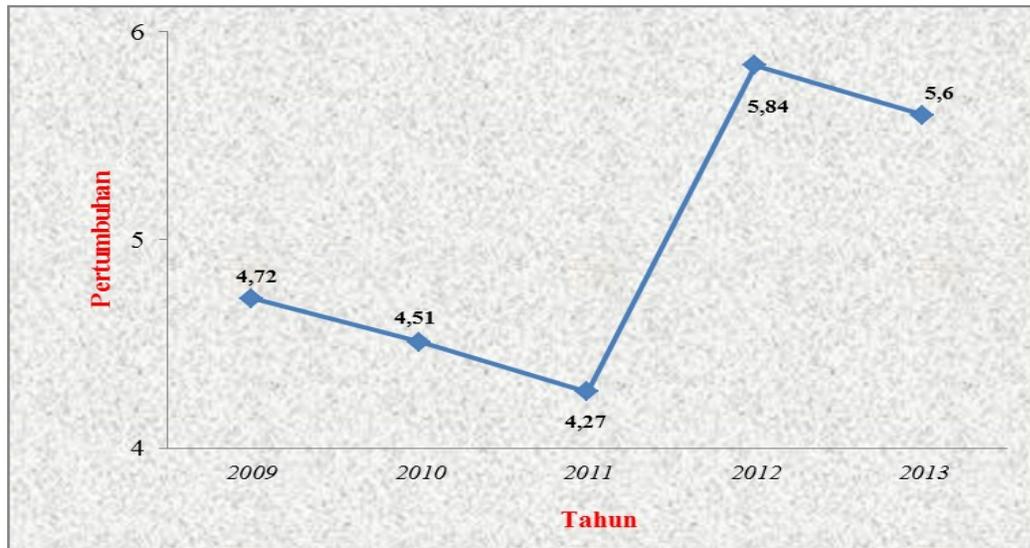
Sektor	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	3,66	1,58	-0,19	3,18	2,87
Pertambangan dan Penggalian	7,47	7,58	8,66	6,32	5,65
Industri Pengolahan	3,28	3,76	3,65	5,86	6,39
Listrik, Gas dan Air Minum	4,40	8,26	4,56	5,81	8,39
Bangunan / Konstruksi	6,74	7,06	8,48	7,08	7,57
Perdagangan, Restoran dan Hotel	3,27	4,54	3,86	6,45	7,11
Pengangkutan dan Komunikasi	5,03	6,17	5,95	7,00	6,55
Keuangan , Perswn dan Jasa Pers	3,54	4,05	4,96	5,59	7,77
Jasa - jasa	7,96	7,71	8,66	8,06	5,73
PDRB	4,72	4,51	4,27	5,84	5,60

Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang pada dua tahun terakhir yaitu 2012 dan 2013 secara agregat mengalami pertumbuhan yang cukup baik, yaitu diatas 5 (lima) persen. Sedangkan selama periode 2009 sampai 2011, perekonomian Kabupaten Magelang hanya tumbuh pada kisaran 4 (empat) persen. Pada tahun 2013 ini sektor listrik, gas dan air minum mengalami pertumbuhan tertinggi kemudian

disusul sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor bangunan/konstruksi.

Grafik 2.4
Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Magelang, 2009 - 2013



Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

Tabel 2.7
Struktur Ekonomi Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku, 2009 – 2013 (Persen)

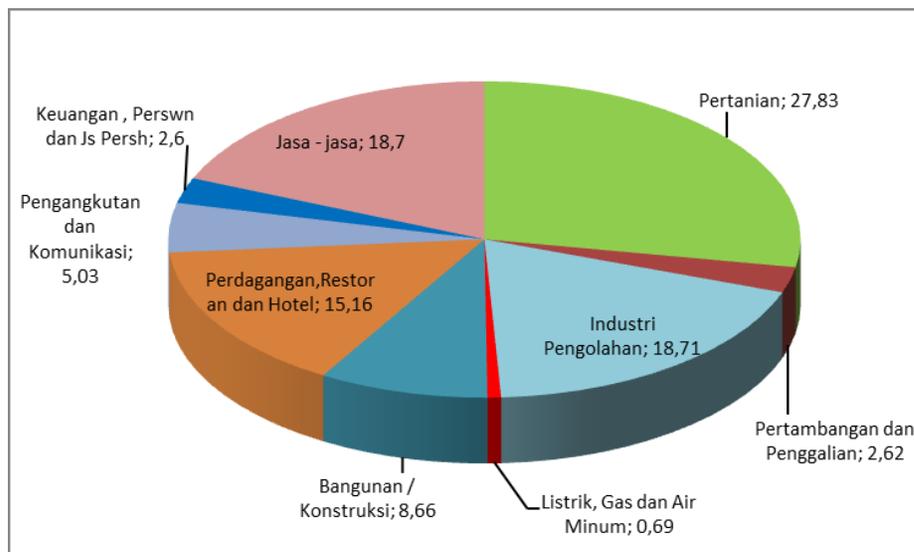
Sektor	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	29,38	29,60	28,79	28,31	27,83
Pertambangan dan Penggalian	2,57	2,54	2,61	2,58	2,62
Industri Pengolahan	18,49	18,00	18,27	18,59	18,71
Listrik, Gas dan Air Minum	0,69	0,68	0,67	0,66	0,69
Bangunan / Konstruksi	8,38	8,29	8,50	8,57	8,66
Perdagangan, Restoran dan Hotel	15,00	15,04	14,99	15,19	15,16
Pengangkutan dan Komunikasi	5,18	5,05	5,07	5,03	5,03
Keuangan, Perswa dan Js Persh	2,76	2,67	2,62	2,55	2,60
Jasa - jasa	17,54	18,13	18,51	18,51	18,70
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, sektor Pertanian masih merupakan sektor yang menjadi andalan di Kabupaten Magelang. Sumbangannya terhadap total PDRB Kabupaten Magelang hampir mencapai 30 persen, paling tinggi dibandingkan sektor lainnya. Hal ini sejalan dengan kondisi Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah agraris.

Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor dominan setelah sektor Pertanian dengan memberikan sumbangan sebesar 18,71 persen. Disusul berikutnya sektor Jasa-jasa dan sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel dengan sumbangan masing-masing sebesar 18,17 persen dan 15,16 persen. Sedangkan sektor Listrik dan Air Minum memberikan sumbangan terkecil yakni hanya sebesar 0,66 persen.

Grafik 2.5
Struktur Ekonomi Kabupaten Magelang
Atas Dasar Harga Berlaku, 2013



Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

2.4. Laju Inflasi

Sisi lain untuk melihat kondisi perekonomian adalah dari angka inflasi yang menunjukkan indikator stabilitas ekonomi dan mencerminkan perubahan harga di suatu wilayah.

Ada harapan yang berbeda dari masyarakat antara laju pertumbuhan ekonomi dengan besarnya angka inflasi, Masyarakat berharap laju pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya selalu bernilai positif dan dalam angka yang cukup besar. Sebaliknya untuk angka inflasi diharapkan selalu mendekati angka 0 (nol). Harapan yang berbeda dari munculnya dua angka tersebut dikarenakan masyarakat berharap ada penambahan pendapatan yang cukup signifikan, akan tetapi harga barang dan jasa yang dibeli tidak mengalami kenaikan harga. Sehingga kesejahteraan yang diidam-idamkan akan semakin mendekati kenyataan.

Tabel 2.8
Laju Inflasi Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
dan Nasional, 2009 - 2013

Tahun	Kab Magelang	Jawa Tengah	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
2009	3,83	3,32	2,78
2010	8,25	6,88	6,96
2011	2,64	2,68	3,79
2012	2,59	4,24	4,30
2013	8,49	7,99	8,38

Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

Hasil tinjauan selama 5 (lima) tahun terakhir pada tabel 2.8 diatas, bahwa dari tahun 2009 sampai 2013 secara umum terjadi fluktuasi laju inflasi baik di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Nasional. Laju inflasi yang cukup tinggi pada ketiga wilayah ini terjadi pada tahun 2010 dan tahun 2013 di mana pada tahun dua tahun ini terjadi kenaikan barang dan jasa yang menyebabkan laju inflasi cukup tinggi. Tingginya angka inflasi tersebut antara lain adalah akibat kebijakan Pemerintah Pusat dengan menaikkan kembali harga BBM dari Rp 4 500,- menjadi Rp 6 500,-, Keberhasilan menekan laju inflasi di tahun berikutnya, menunjukkan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa di Kabupaten Magelang masih dapat dikendalikan.

Besarnya inflasi di tahun 2013, bila dilihat menurut kelompok pengeluaran selama periode Januari - Desember 2013, maka tingkat inflasinya adalah sebagai berikut: kelompok bahan makanan sebesar 5,43 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar - 0,81 persen; kelompok perumahan sebesar 0,00 persen; kelompok sandang sebesar -0,13 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,12 persen; kelompok pendidikan dan kelompok transport masing-masing 0,00 persen.

Bab III Kondisi Pembangunan Manusia

3.1. Pembangunan Manusia

Pembangunan menurut David Korten adalah suatu proses yang didalamnya anggota masyarakat bisa meningkatkan kemampuan pribadi dan kelembagaan mereka, untuk mengerahkan dan mengelola sumber-sumber yang tersedia, demi menciptakan perbaikan-perbaikan mutu kehidupan mereka secara bersinambungan dan adil, sesuai dengan aspirasi-aspirasi mereka sendiri.

Pernyataan tersebut menekankan bahwa pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab individu, anggota masyarakat dan juga lembaga-lembaga yang ada. Ditekankan pula bahwa pembangunan bukanlah soal pertumbuhan atau peningkatan hasil, melainkan transformasi yang merujuk pada keadilan, kesinambungan, dan inklusifitas sebagai kebutuhan pokok bagi masyarakat global.

UNDP dalam *Human Development Report*-nya yang pertama (1990) menyatakan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan sederhana, tetapi sering terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang.

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Diantara berbagai pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmupengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Diantara pilihan yang tak kalah pentingnya adalah kebebasan berpolitik, jaminan atas hak asasi dan harga diri. Dengan demikian pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan peningkatan kemampuan manusia, seperti meningkatkan kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia juga mementingkan apa yang bisa

dilakukan oleh manusia dengan kemampuan yang dimilikinya untuk bersenang-senang, untuk melakukan kegiatan produktif, atau untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan budaya, sosial dan politik. Pembangunan manusia harus menyeimbangkan semua aspek tersebut.

Paradigma pembangunan manusia mengandung empat komponen utama :

1. Produktifitas

Manusia harus berkemampuan untuk meningkatkan produktifitasnya dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan kerja. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

2. Pemerataan

Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan sehingga semua orang dapat berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari peluang yang tersedia.

3. Keberlanjutan

Akses terhadap peluang/kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua bentuk sumber daya fisik harus dapat diperbaharui.

4. Pemberdayaan

Pembangunan harus dilakukan oleh semua orang, bukannya semata-mata (dilakukan) untuk semua orang. Semua orang harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

3.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

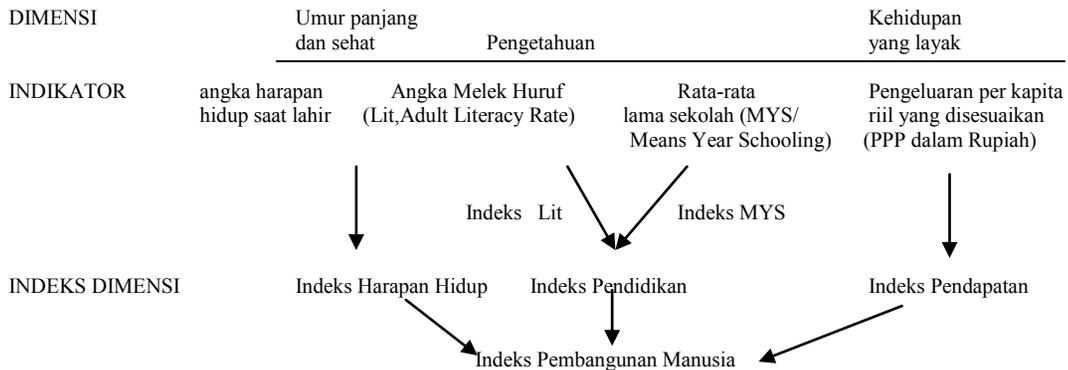
Pada hakekatnya, tujuan visi dan misi Kabupaten Magelang yang telah ditetapkan baik dalam Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Magelang maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Panjang (RPJM/RPJP) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Guna mengukur tingkat keberhasilan pembangunan, banyak indikator yang dapat dijadikan sebagai alat ukur. Indikator tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu indikator tunggal dan indikator komposit. Contoh indikator tunggal adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pertumbuhan PDRB, tingkat perubahan harga barang dan jasa diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan program pengentasan buta huruf diukur dengan angka melek huruf. Sedangkan yang termasuk indikator komposit salah satunya adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

IPM mengukur tingkat pencapaian keseluruhan dari suatu wilayah negara/propinsi/kabupaten/kota dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, pengetahuan dan suatu standar hidup yang layak. Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan dan pendapatan perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. (*UNDP : Human Development Report 2001*).

Lebih jauh UNDP menyatakan bahwa IPM adalah suatu ringkasan dan bukan suatu ukuran komprehensif dari pembangunan manusia. IPM memang dirancang untuk mengukur tingkat kemajuan sosial ekonomi. Angka IPM hanya memberi indikasi saja. Tetapi dengan menghitung IPM merupakan langkah yang jauh lebih maju dari pada langkah terdahulu yang hanya terkonsentrasi pada tingkat pendapatan saja.

Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat dari diagram berikut ini.



IPM merupakan angka agregat yang dapat diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimum 100. Bagi suatu wilayah angka IPM yang diperoleh menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di daerah tersebut, merupakan tantangan yang harus dihadapi dan upaya apa yang harus dilakukan untuk mengurangi jarak yang harus ditempuh. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang disusun dari tiga indikator : lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah (rata-rata jumlah tahun yang telah dijalani) dan angka melek huruf (persentase dari penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan bisa menulis huruf latin atau lainnya terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih); dan standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita (PPP - *Puchasing Power Parity*/Paritas Daya Beli - dalam rupiah). IPM secara matematis merupakan rata-rata hitung dari ketiga komponen indeks tersebut.

Metode penghitungan IPM dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$IPM = \frac{1}{3} (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3)$$

Dimana :

X_1 = indeks lamanya hidup

X_2 = indeks tingkat pendidikan yang dirumuskan sbb :

$$X_2 = \frac{1}{3}X_{21} + \frac{2}{3}X_{22}$$

Dimana :

X_{21} =rata-rata lamanya sekolah

X_{22} =angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas

X_3 =indeks tingkat kehidupan yang layak

Penghitungan indeks dari msing-masing indikator tersebut adalah :

Indeks $X_{(i,j)} = (X_{(i,j)} - X_{(i-min)}) / (X_{(i,max)} - X_{(i-min)})$

Dimana :

$X_{(i,j)}$ =indikator ke-i dari daerah j

$X_{(i-min)}$ =nilai minimum dari X_i

$X_{(i-max)}$ =nilai maximum dari X_i

Tabel 3.1 Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup (e_0)	85	25	Standar UNDP
Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	15	0	
Daya beli (000 Rp.)	732,720	300,000	

Sumber : Badan Pusat Statistik Jakarta

Jadi masing-masing indeks dihitung dengan formula sebagai berikut :

1. Indeks Harapan Hidup (e_0)

$$= [(e_0 - 25) / (85 - 25)] \times 100$$

dimana e_0 = angka harapan hidup

25 = angka minimum harapan hidup (UNDP)

85 = angka maksimum harapan hidup (UNDP)

2. Indeks Pendidikan

$$= [[(1/3) [(MYS - 0)/(15 - 0)] + (2/3) [(Lit - 0)/(100 - 0)]] \times 100$$

dimana Lit = angka melek huruf

MYS = lama sekolah

0 = angka minimum baik untuk Lit maupun MYS

100 = angka maksimum Lit (melek huruf)

15 = angka maksimum MYS (lama sekolah)

3. Indeks Pendapatan / Indeks Konsumsi Riil per Kapita

$$= [(PPP - 300,00) / (732,72 - 300,00)] \times 100$$

dimana PPP = nilai konsumsi riil per kapita yang disesuaikan
(rumus Atkinson)

300,00 = nilai konsumsi minimal (standard UNDP)

732,72 = nilai konsumsi maksimum (standard UNDP)

Dari formula penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diatas, maka akan diperoleh hasil IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka 0 menyatakan tingkat pembangunan manusia yang paling rendah dan angka 100 menyatakan tingkat pembangunan manusia yang paling tinggi. Tingkat keberhasilan pembangunan manusia pada suatu negara (wilayah), menurut UNDP dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu :

- a. Nilai IPM 0 sampai 49, tingkat pembangunan manusia rendah
- b. Nilai IPM 50 sampai 79, tingkat pembangunan manusia menengah
- c. Nilai IPM 80 dan lebih, tingkat pembangunan manusia tinggi

3.2.1. Lamanya Hidup (Longevity)

Pembangunan manusia atau upaya untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk harus lebih mengupayakan agar penduduk dapat mencapai usia hidup lebih panjang dan sehat. Sebenarnya ada berbagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur lama hidup dan hidup sehat, tetapi dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara global, UNDP memilih indikator angka harapan hidup waktu lahir (*Life Expectancy At Birth* (e_0)). Variabel e_0 mencerminkan lama hidup dan hidup sehat.

Model penghitungan nilai IPM dari komponen ini dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui dua tahapan penghitungan dan variabel yang digunakan sebagai acuan dalam penentuan nilai indeksnya adalah *rata-rata anak yang*

dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Sehingga angka yang diperoleh merupakan gabungan dua variabel tersebut.

3.2.2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan dan pengetahuan diakui secara luas sebagai unsur dasar dari pembangunan manusia. Dalam menyusun IPM pengetahuan diukur dengan indikator melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf adalah persentase dari penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih. Indikator ini diberi bobot dua per tiga. Bobot sepertiganya diberikan pada indikator rata-rata lama sekolah (MYS), yaitu rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas diseluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki, yang ditanyakan pada kuesioner susenas.

Perbedaan-perbedaan angka yang mungkin timbul karena definisi dan penggunaan peraga atau tidak dalam pengumpulan datanya, dapat diminimalkan dengan menyeragamkan konsep “mampu membaca dan menulis” dan dalam menanyakannya tanpa alat peraga. Kalaupun masih ada dampak dari kelemahan tersebut, dapat diminimalkan dengan memasukkan indikator rata-rata lama sekolah (MYS).

MYS dihitung dari variabel pendidikan yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki (pertanyaan ini ditanyakan pada kuesioner Susenas). Tabel dibawah ini menyajikan faktor konversi dari tiap jenjang pendidikan yang ditamatkan. Untuk yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan, lama sekolah (YS) dihitung berdasarkan formula dibawah ini :

$$\mathbf{YS = tahun\ konversi + kelas\ tertinggi\ yang\ pernah\ diduduki - 1}$$

Contoh :

Seseorang yang bersekolah sampai dengan kelas 2 SMU : $YS = 9 + 2 - 1 = 10$ (tahun)

Tabel 3.2 Tahun Konversi dari Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Tahun konversi
(1)	(2)
Tidak pernah sekolah	0
Sekolah dasar	6
SLTP	9
SLTA/SMU	12
Diploma I	13
Diploma II	14
Akademi/Diploma III	15
Diploma IV/Sarjana	16
Magister (S2)	18
Doktor (S3)	21

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Dalam penghitungannya, indeks pendidikan dapat dirumuskan sbb.:

$$IP = \frac{2}{3} \text{ Indeks Lit} + \frac{1}{3} \text{ Indeks MYS}$$

3.2.3. Paritas Daya Beli /*Purchasing Power Parity* (PPP)

Memasukkan variabel Paritas Daya Beli atau *Purchasing Power Parity* (PPP) dalam penghitungan IPM akan menambah lengkapnya IPM dalam merefleksikan tingkat taraf pembangunan manusia.

Penghitungan PPP dilakukan dengan cara membandingkan rata-rata konsumsi riil per kapita kabupaten/kota. Langkah pertama adalah menentukan komoditas yang bisa dibandingkan. Angka yang dihasilkan masih disesuaikan lagi dengan formula Atkinson untuk memperoleh cerminan daya manfaat yang standar. Penyesuaian dengan rumus Atkinson pada dasarnya menggunakan prinsip Diminishing marginal utility yang secara matematis dapat dirumuskan sbb. :

$$\begin{aligned}
C(I) &= C(i) && \text{jika } C(i) < Z \\
&= Z+2(C(i)-Z)^{(1/2)} && \text{jika } Z < C(i) < 2Z \\
&= Z+2Z^{(1/2)} +3(C(i)-2Z)^{(1/3)} && \text{jika } 2Z < C(i) < 3Z \\
&= Z+2Z^{(1/2)} +3 Z^{(1/3)} +4(C(i)-2Z)^{(1/4)} && \text{jika } 2Z < C(i) < 3Z
\end{aligned}$$

dimana :

$$\begin{aligned}
C(i) &= \text{PPP dari riil pengeluaran per kapita} \\
Z &= \text{batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter}
\end{aligned}$$

Ada beberapa indikator yang tersedia yang dapat digunakan untuk mengukur daya beli penduduk, antara lain: PDRB, rata-rata konsumsi dari susenas yang ditimbang dengan IHK (Indeks Harga Konsumen) dan rata-rata konsumsi dari susenas yang disesuaikan dengan indeks PPP. Hasil evaluasi secara cermat menunjukkan bahwa indikator yang terakhir dianggap paling baik sesuai daya beli antar daerah. PDRB tidak digunakan karena penduduk suatu daerah tidak langsung menikmati hasil produksi masing-masing daerah. Rata-rata konsumsi yang dikoreksi dengan IHK juga tidak dipilih sebagai indikator IPM karena IHK hanya mencerminkan perbedaan daya beli antar daerah kota. Namun demikian, IHK di 35 kabupaten/kota tetap digunakan sebagai deflator dalam menghitung perkiraan nilai PPP antar kabupaten/kota dalam harga konstan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka penghitungan PPP dilakukan dengan tahapan sbb. :

1. Menghitung angka rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk setiap kabupaten/kota dengan menggunakan data susenas yang mencakup pengeluaran konsumsi untuk semua jenis barang atau jasa. Hasil penghitungan ini selanjutnya dikalikan 12 untuk memperoleh angka tahunan (dinotasikan dengan E)
2. Menghitung nilai pengeluaran riil (dinotasikan dengan E) agar nilai tersebut dapat dibandingkan antar waktu. Cara penghitungannya ialah dengan

membagi rata-rata pengeluaran dengan IHK pada masing-masing kabupaten/kota.

3. Menghitung PPP (unit), semacam faktor pengali (dinotasikan dengan R), untuk menghilangkan pengaruh perbedaan harga antar kabupaten/kota.
4. Menghitung nilai PPP dalam rupiah ($Y^*(i)$) dengan rumus :

$$Y^*(i) = \frac{E(i)}{R(i)}$$

Dimana :

- $Y^*(i)$ = PPP (rupiah)
- $E(i)$ = pengeluaran per tahun dalam harga konstan
- $R(i)$ = PPP (unit)
- (i) = Kabupaten ke i

5. Menghitung penyesuaian PPP (rupiah) dengan formula Atkinson.

Dari penjelasan-penjelasan yang sudah disebutkan diatas dapat diketahui bahwa untuk menghitung IPM Kabupaten Magelang diperlukan data dari kabupaten lainnya untuk masing-masing komponen. Dengan kata lain IPM Kabupaten Magelang tidak dapat dihitung secara terpisah/sendiri-sendiri.

3.3. Nilai Dan Posisi IPM

IPM dihitung untuk mengungkapkan status pembangunan manusia. Dari nilai IPM tahun 2013 yang sebesar 73,67 menjadikan Kabupaten Magelang masuk kategori kelas menengah atas karena nilai IPM berkisar antara 66 s/d 79,99 (menurut skala internasional). Daerah yang masuk kategori pembangunan manusianya tinggi apabila nilai IPM-nya lebih dari 80, kategori kelas menengah kebawah apabila nilai IPM berkisar 50-65,99 dan daerah dengan kelas pembangunan manusianya rendah apabila IPM-nya kurang dari 50.

Tabel 3.3
Nilai dan Peringkat IPM Kabupaten/Kota se-Karesidenan Kedu, 2013

No	Kabupaten/ Kota	Nilai IPM	Peringkat Kedu	Peringkat Jateng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Kebumen	72,25	5	26
2	Kab. Purworejo	74,18	3	13
3	Kab. Wonosobo	71,90	6	31
4	Kab. Magelang	73,67	4	18
5	Kab. Temanggung	75,00	2	9
6	Kota Magelang	77,91	1	3

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Predikat pembangunan manusia dengan kelas menengah diperoleh oleh semua kabupaten/kota di Karesidenan Kedu. Namun bila nilai indeksnya diperbandingkan, maka akan didapat bahwa Kabupaten Magelang menduduki posisi ke-4 se Karesidenan Kedu setelah Kabupaten Purworejo yang berada pada urutan ketiga, Kabupaten Temanggung pada urutan kedua, dan Kota Magelang yang berada pada urutan pertama. Sedangkan pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang berada pada urutan ke 18.

3.4. Komponen-Komponen IPM

Sudah dijelaskan pada bahasan sebelumnya bahwa IPM disusun oleh tiga indikator: lama hidup yang diukur dengan Angka Harapan Hidup Ketika Lahir (e_0); pendidikan yang diukur berdasarkan Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) dan Angka Melek Huruf (Lit); dan standar hidup yang diukur dengan Pengeluaran Per Kapita (PPP-*Purchasing Power Parity*/paritas daya beli- dalam rupiah). Pada bahasan kali ini akan dibicarakan nilai dari masing-masing komponen IPM tersebut.

Perubahan angka yang terjadi pada komponen IPM sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel atau indikator pendukung. Jenis variabel atau indikator tersebut terbagi kedalam indikator input, proses dan output. Sebagai contoh: Angka Harapan

Hidup merupakan indikator dampak (output) dari angka kematian bayi sebagai sasaran pembangunan. Angka kematian bayi sendiri dipengaruhi oleh cakupan imunisasi, penolong persalinan dan lain sebagainya (merupakan indikator proses).

Angka IPM Kabupaten Magelang tahun 2013 sebesar 73,67 dan berada pada peringkat ke-4 se-Karesidenan Kedu ini, bila dilihat dari komponen-komponen IPM Kabupaten Magelang seperti pada tabel 3.4 tercatat bahwa angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Magelang berada di urutan ke-4, naik satu peringkat dibanding tahun 2012 di mana angka harapan hidup pada tahun tersebut berada pada urutan ke-5 se-Karesidenan Kedu. Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah berada di urutan ke-3 dan untuk pengeluaran riil perkapita penduduk berada pada urutan ke-2 naik satu peringkat dibanding peringkat pada tahun 2012. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan pembangunan di setiap Kabupaten/Kota se-Karesidenan Kedu menghasilkan output yang berbeda-beda dampaknya terhadap pembangunan manusia.

Tabel 3.4
Nilai Komponen-Komponen IPM Kabupaten/Kota se-Karesidenan Kedu, 2013

No	Kabupaten	Angka Harapan Hidup (tahun)		Angka Melek Huruf (persen)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran Riil Per Kapita disesuaikan (Rp 000)	
		Nilai	Peringkat	Nilai	Peringkat	Nilai	Peringkat	Nilai	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kab. Kebumen	69,73	6	91,78	6	6,93	5	644,00	3
2	Kab. Purworejo	71,44	2	93,53	4	8,02	2	641,04	5
3	Kab. Wonosobo	70,58	5	92,30	5	6,56	6	635,33	6
4	Kab. Magelang	70,63	4	93,64	3	7,55	3	644,48	2
5	Kab. Temanggung	72,87	1	95,99	2	7,10	4	643,28	4
6	Kota Magelang	70,74	3	98,11	1	10,42	1	658,26	1

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

3.4.1. Angka Harapan Hidup (e_0)

Angka harapan hidup dapat diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dijalani seseorang hingga akhir hayat. Angka ini dapat dihitung dengan bantuan tabel kematian (*life tabel*) dan beberapa program paket komputer. Angka harapan hidup diharapkan mencerminkan “lama hidup” dan “hidup sehat”. Lama hidup seseorang, tidak terlepas dari kesehatan orang tersebut. Usia hidup panjang tanpa didukung oleh kesehatan yang baik tentunya akan menjadi beban. Dengan kata lain, apabila membicarakan usia harapan hidup maka tidak akan terlepas dari pembicaraan upaya peningkatan taraf kesehatan.

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Magelang tahun 2013 adalah 70,63 tahun. Artinya, pada tahun 2013 seorang penduduk Kabupaten Magelang akan mempunyai harapan untuk terus hidup sampai usia 70,63 tahun. Dari tahun ke tahun angka harapan hidup di Kabupaten Magelang selalu meningkat, ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Magelang memiliki harapan untuk terus hidup bertambah. Hal ini dimungkinkan karena masyarakat sudah semakin peduli dengan pentingnya kesehatan sehingga angka harapan hidupnya terus meningkat.

Tabel 3.5
Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Karesidenan Kedu, 2009 - 2013

No	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup/ (e_0) (tahun)				
		2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Kebumen	69,26	69,32	69,37	69,43	69,73
2	Kab. Purworejo	70,27	70,52	70,78	71,04	71,44
3	Kab. Wonosobo	69,74	69,98	70,23	70,48	70,58
4	Kab. Magelang	70,07	70,12	70,18	70,23	70,63
5	Kab. Temanggung	72,43	72,54	72,66	72,77	72,87
6	Kota Magelang	70,17	70,22	70,28	70,34	70,74
Jawa Tengah		71,25	71,40	71,55	71,70	71,97

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Selama tahun 2009 sampai tahun 2013, keterbandingan secara kewilayahan se-Karesidenan Kedu, angka harapan hidup Kabupaten Magelang menempati posisi ke-4 dan pernah di urutan ke-5 yaitu pada tahun 2011. Bila dibandingkan dengan Jawa Tengah, tahun 2009 sampai tahun 2013 angka harapan hidup Kabupaten Magelang secara umum masih dibawah angka harapan hidup Jawa Tengah.

Angka harapan hidup yang cukup tinggi tersebut merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan. Pernyataan tersebut berdasarkan pada asumsi bahwa lama hidup seseorang dipengaruhi oleh tingkat kesehatan yang tinggi, asupan gizi yang baik dan kepedulian terhadap kesehatan dengan cara merawatnya yang cukup tinggi.

Faktor kesehatan balita, ibu hamil dan penyebab kematian pada usia balita saat ibu melahirkan sangat perlu diperhatikan. Semakin dini kesehatan balita dan ibu hamil diperhatikan dan dengan bekal gizi yang baik, diharapkan taraf kesehatan juga akan semakin baik. Dengan demikian harapan hidup panjang akan lebih terwujud.

3.4.2. Pendidikan

Indeks pendidikan bisa dihitung setelah didapat Angka Melek Huruf (Lit) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS). Berikut ini akan dibahas secara singkat tentang kedua indikator tersebut.

3.4.2.1. Angka Melek Huruf (Lit)

Kesepakatan Pakar menyebutkan bahwa pada tahun 2015 angka *enrolment* (tingkat kesertaan sekolah) disekolah dasar harus mencapai 100%. Angka melek huruf merupakan salah satu indikator dibidang pendidikan yang diukur dengan kemampuan untuk membaca dan menulis. Semakin tinggi nilai indikator ini, maka akan semakin tinggi mutu sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal yang sangat berarti bagi pembangunan, baik pembangunan manusianya sendiri maupun pembangunan secara keseluruhan.

Angka melek huruf masyarakat Kabupaten Magelang pada tahun 2013 tercatat sebesar 93,64 persen. Bila diamati se-Karesidenan Kedu, angka melek huruf Kabupaten Magelang ini berada pada urutan ke-3 setelah Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung. Angka yang cukup tinggi ini diperoleh berkat upaya Pemerintah Kabupaten Magelang yang sungguh-sungguh untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Dan ini merupakan langkah awal yang cukup baik sebagai pijakan untuk pembangunan sumber daya manusia dimasa yang akan datang. Upaya yang telah dilaksanakan tersebut diantaranya dengan mendekatkan sarana pendidikan dasar ke tempat tinggal penduduk dengan tersebarnya Sekolah Dasar (SD) ke semua desa.

Tabel 3.6
Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota se-Karesidenan Kedu, 2009 - 2013

No	Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf (persen)				
		2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Kebumen	90,40	90,74	91,53	91,54	91,78
2	Kab. Purworejo	89,78	91,51	91,74	92,79	93,53
3	Kab. Wonosobo	89,27	90,47	91,16	91,43	92,30
4	Kab. Magelang	91,35	91,35	93,29	93,31	93,64
5	Kab. Temanggung	95,94	95,94	95,96	95,97	95,99
6	Kota Magelang	97,25	97,25	97,29	97,52	98,11
Jawa Tengah		-	89,95	90,34	90,45	91,71

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

3.4.2.2. Rata-Rata Lama Sekolah (MYS)

Indikator untuk mengukur pembangunan manusia dibidang pendidikan salah satunya adalah rata-rata lama sekolah. Indikator ini memberikan rata-rata waktu yang ditempuh penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal. Populasi yang dipakai UNDP dalam menghitung rata-rata lama sekolah dibatasi pada penduduk usia 25 tahun keatas. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam

proses sekolah sehingga belum pantas ditanyakan rata-rata lama sekolahnya. Tetapi dalam pembahasan ini yang digunakan adalah penduduk berusia 15 tahun keatas dan penghitungan rata-rata lama sekolahnya memakai metode tidak langsung, dengan memberikan bobot kepada tiap jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Tingkat kemampuan baca tulis masyarakat yang cukup tinggi belum diimbangi dengan kesadaran dari masyarakat untuk mengenyam pendidikan formal yang lebih panjang. Ini dibuktikan dengan besaran angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Magelang tahun 2013 ini sama besarnya dengan tahun 2012 yang baru mencapai 7,55 tahun.

Bila dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota se-Karesidenan Kedu, lamanya sekolah masyarakat Kabupaten Magelang yang di tahun 2012 pada urutan yang kedua, di tahun 2013 ini turun peringkatnya yaitu pada urutan yang ketiga setelah Kota Magelang dan Kabupaten Purworejo. Dengan rata-rata lama sekolah yang sebesar 7,55 tahun, dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata masyarakat Kabupaten Magelang telah menempuh pendidikan selama 7,55 tahun atau setara menduduki bangku kelas 1 (satu) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Tabel 3.7
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Karesidenan Kedu, 2009 - 2013

No	Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)				
		2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Kebumen	6,84	6,87	6,92	6,93	6,93
2	Kab. Purworejo	7,70	7,75	7,84	7,93	8,02
3	Kab. Wonosobo	6,27	6,27	6,55	6,56	6,56
4	Kab. Magelang	7,26	7,26	7,33	7,55	7,55
5	Kab. Temanggung	6,86	7,01	7,09	7,10	7,10
6	Kota Magelang	10,10	10,21	10,22	10,36	10,42
Jawa Tengah		7,07	7,24	7,29	7,39	7,43

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Memperhatikan tabel di atas, hasil penghitungan Angka Lama Sekolah untuk penduduk Kabupaten Magelang periode 2009 - 2013 mengalami kenaikan meskipun agak lamban. Walaupun wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sudah berjalan, namun masih tingginya biaya penunjang pendidikan seperti untuk anak SMP adalah biaya untuk transport dan pembelian buku-buku diluar dana BOS merupakan salah satu faktor yang menyebabkan lambannya kenaikan angka rata-rata lama sekolah ini, yang sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk mengikuti/melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Disamping itu adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah digulirkan oleh Pemerintah Pusat dan Bantuan Pendidikan, ternyata belum sepenuhnya mampu secara signifikan mengatasi mahalnya biaya pendidikan. Karena dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Pendidikan ternyata hanya untuk mencukupi kebutuhan minimum siswa/anak didik, sehingga perlu lebih banyak lagi program-program lain yang berpihak pada mereka yang merasa keberatan atas tingginya biaya pendidikan. Disamping itu perlu diingat pula bahwa angka rata-rata lama sekolah dihitung menggunakan dasar penduduk 15 tahun keatas yang dalam kenyataannya penduduk yang sudah tua dan untuk Kabupaten Magelang umumnya mempunyai lama sekolah yang kecil sehingga mempengaruhi lambannya kenaikan angka ini.

Terlepas dari jalannya yang lamban, faktor lain dari meningkatnya angka rata-rata lama sekolah selama periode tahun 2009 sampai tahun 2013 ini dimungkinkan adanya kesadaran dari masyarakat Kabupaten Magelang yang telah putus sekolah untuk kembali ke bangku sekolah melalui sekolah-sekolah terbuka yang ada di Kabupaten Magelang, disamping mereka tetap bekerja untuk mencari penghasilan. Hal ini dikarenakan terbukanya kesempatan yang lebih banyak dan masyarakat semakin sadar akan arti pentingnya pendidikan.

3.4.3. Kemampuan Daya Beli (PPP)

Kemampuan daya beli memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat dikatakan memenuhi standar hidup layak. Dengan meningkatnya pendapatan seseorang diharapkan kemampuan daya beli akan meningkat pula, dengan syarat kenaikan pendapatan tidak dibarengi dengan kenaikan harga barang dan jasa yang jauh lebih tinggi dari kenaikan pendapatan tersebut.

Dasar penghitungan kemampuan daya beli tidak secara langsung dikaitkan dengan salah satu indikator pendapatan yang sudah dikenal luas yaitu PDRB. Alasannya karena tolok ukur pendapatan daerah, produksinya tidak langsung dirasakan oleh penduduk, alasan lainnya karena pendapatan orang yang sama belum tentu mempunyai kemampuan daya beli yang sama bila kedua orang tersebut mempunyai tempat tinggal yang berbeda. Sehingga perlu dilakukan penghitungan daya beli yang representatif.

Selain PDRB, ada beberapa indikator yang dapat dijadikan untuk mengukur kemampuan daya beli masyarakat, seperti indeks PPP yang merupakan rata-rata konsumsi Susenas yang ditimbang dengan IHK (Indeks Harga Konsumen). Hasil evaluasi yang dilakukan dengan cara cermat didapat bahwa metode terakhir yang paling baik untuk dijadikan tolok ukur daya beli masyarakat.

Alasan mengapa rata-rata konsumsi Susenas yang ditimbang dengan IHK tidak dijadikan sebagai alat untuk mengukur kemampuan daya beli masyarakat adalah karena angka yang didapat hanya mencerminkan perbedaan daya beli masyarakat kota. Tetapi dalam penggunaannya angka IHK tetap digunakan sebagai deflator dalam penghitungan perkiraan PPP antar kabupaten/kota dalam harga konstan, sehingga angka yang disajikan dapat diperbandingkan antar daerah.

Dalam lima tahun terakhir, kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Magelang senantiasa mengalami kenaikan walaupun hanya berkisar dua sampai tiga ribuan rupiah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Magelang pada tahun

2013 ini sebesar Rp. 644.480,-. Untuk tahun ini kemampuan daya beli masyarakat di Kabupaten Magelang melaju pada urutan kedua setelah Kota Magelang, setelah di beberapa tahun sebelumnya berada di bawah kabupaten-kabupaten yang lain.

Tabel 3.8
Rata-rata Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten/Kota se-Karesidenan Kedu, 2009 - 2013

No	Kabupaten/Kota	Pengeluaran Per Kapita				
		(Ribu Rupiah)				
		2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Kebumen	632,43	635,81	639,16	641,78	644,00
2	Kab. Purworejo	633,61	634,97	636,29	638,51	641,04
3	Kab. Wonosobo	629,26	629,76	630,41	632,71	635,33
4	Kab. Magelang	633,26	636,96	638,16	641,45	644,48
5	Kab. Temanggung	633,87	635,01	638,07	640,56	643,28
6	Kota Magelang	648,06	649,52	651,91	655,08	658,26
	Jawa Tengah	636,39	637,27	640,41	643,53	646,44

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Bab IV Indikator Pendukung Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan angka indeks komposit. IPM sebagai indikator pembangunan manusia membutuhkan indikator lain yang merupakan indikator input, proses maupun output pembangunan. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, pada bab ini akan dibahas indikator-indikator tunggal lainnya yang merupakan indikator dari hasil pembangunan manusia di Kabupaten Magelang. Dengan dipaparkannya indikator-indikator tunggal tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan lebih jelas tentang kondisi pembangunan manusia untuk beberapa tahun belakangan ini.

4.1. Ketenagakerjaan

Ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup merupakan dambaan pemerintah dan masyarakat di belahan dunia manapun. Guna mewujudkan mimpi bersama tersebut, salah satu komitmen pemerintah adalah mengurangi jumlah pengangguran dan perlu diketahui bahwa terserapnya tenaga kerja merupakan dampak dari semakin membaiknya kondisi perekonomian secara makro.

Menurut UNICEF, seharusnya tenaga kerja adalah penduduk yang telah berusia 15 tahun keatas. Tetapi pada kenyataannya, di Indonesia masih banyak dijumpai tenaga kerja dibawah usia 15 tahun, sehingga dalam beberapa pengumpulan data usia kerja dimulai dari usia 10 tahun keatas.

Dalam pengumpulan data ketenagakerjaan, BPS membedakan penduduk kedalam dua kelompok besar yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja masih dibedakan lagi kedalam dua kelompok, yaitu kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Penduduk angkatan kerja adalah mereka yang seminggu yang lalu sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Bagi penduduk yang sedang sekolah, mengurus rumah tangga dan penduduk yang melakukan aktifitas lainnya termasuk yang tidak mampu melakukan kegiatan seperti:

jompo, pensiun, penerima pendapatan/transfer/kiriman dan sebagainya, dikelompokkan pada kelompok bukan angkatan kerja.

Yang dimaksud dengan penduduk bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh nafkah atau membantu memperoleh nafkah paling sedikit satu jam terus menerus selama seminggu yang lalu. Kegiatan bekerja mencakup baik orang yang sedang bekerja maupun orang yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misal: cuti, sakit dan sejenisnya.

4.1.1. Aktivitas Penduduk Usia Kerja

Angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang bekerja dan yang mencari pekerjaan. Hasil Susenas tahun 2013 menunjukkan bahwa sebesar 72,77% penduduk di Kabupaten Magelang tergolong angkatan kerja. Angka ini cenderung lebih besar bila dibandingkan dua tahun yang lalu, di mana tahun 2011 sebesar 64,68% dan 2012 sebesar 65,13%. Seperti tercantum pada tabel 4.1 di bawah bahwa dari 72,77% total angkatan kerja, terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 71,51% dan yang sedang mencari pekerjaan sebesar 1,26%. Dari kecenderungan kenaikan persentase penduduk usia kerja ini diimbangi dengan terjadinya penurunan pada penduduk usia kerja yang sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (penduduk bukan angkatan kerja).

Penduduk bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Penduduk Kabupaten Magelang tahun 2013 yang masuk kategori bukan angkatan kerja sebesar 27,23%. Sumbangan terbesar untuk angka ini adalah dari penduduk yang mengurus rumah tangga sebesar 16,87%. Sebesar 6,19% sumbangan dari kegiatan bersekolah dan yang 4,17 adalah dari kegiatan lainnya.

Tabel 4.1
Persentase Angkatan Kerja dan Kegiatan yang Dilakukan Selama Seminggu yang Lalu
di Kabupaten Magelang, 2010 - 2013

URAIAN	2010		2011		2012		2013	
	% thd Total	% thd Sub Total	% thd Total	% thd Sub Total	% thd Total	% thd Sub Total	% thd Total	% thd Sub Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Angkatan Kerja	79,26		64,68		65,13		72,77	
Bekerja	77,56	97,86	61,69	95,38	63,22	97,07	71,51	98,27
Mencari Kerja	1,7	2,14	2,99	4,62	1,91	2,93	1,26	1,73
Bukan Angkt. Kerja	20,74		38,32		34,87		27,23	
Sekolah	4,03	19,43	6,42	16,75	6,33	18,15	6,19	22,73
Mengurus Rmh Tangga	12,85	61,96	23,18	60,49	21,15	60,65	16,87	61,95
Lainnya	3,86	18,61	8,72	22,76	7,39	21,19	4,17	15,31
Jumlah	100,00		100,00		100,00		100,00	

Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

4.1.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Pola perkembangan TPAK sangat dipengaruhi oleh struktur penduduk menurut umur, perkembangan sosial ekonomi dan budaya dalam suatu masyarakat.

Tabel 4.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Magelang, 2009 - 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TPAK	72,86	74,08	71,52	74,52	70,35
TPT	4,95	4,97	5,98	4,47	6,22

Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

Selama kurun waktu tahun 2009 sampai tahun 2013 terlihat bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Magelang terjadi fluktuasi. Dari tahun 2009 TPAK Kabupaten Magelang sebesar 72,86 persen, naik menjadi 74,08 di tahun 2010 kemudian turun sebesar 71,52 di tahun 2011, naik lagi di tahun 2012 sebesar 74,52 persen dan untuk tahun 2013 kembali turun menjadi 70,35 persen. TPAK sebesar 70,35 persen dapat diartikan bahwa dari 100 penduduk usia kerja, 70 orang diantaranya merupakan angkatan kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. TPT dihitung dari jumlah pencari kerja dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100. Pada tahun 2013, TPT Kabupaten Magelang sebesar 6,22 persen, mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2012 yang hanya sebesar 4,47 persen. Menjadi PR khususnya untuk Pemerintah Daerah melihat kenaikan TPT tahun ini, bagaimana mencari solusi yang tepat untuk angka TPT ini bahwa ada 6 orang yang sedang mencari kerja di tiap 100 penduduk usia kerja.

4.1.3. Penduduk Bekerja

Dari data Susenas 2013, diketahui bahwa penduduk yang bekerja di Kabupaten Magelang pada tahun ini sebesar 71,51% dari total penduduk usia kerja. Dalam empat tahun terakhir jumlah penduduk yang bekerja semakin beranjak naik setelah terjadi penurunan yang cukup besar di tahun 2011 yaitu sebesar 77,56% di tahun 2010 turun menjadi 61,69% di tahun 2011. Namun secara perlahan jumlah penduduk yang bekerja ini semakin bertambah hingga di tahun 2013, ini membuktikan adanya upaya dari pemerintah maupun masyarakat sendiri untuk bisa lebih memperbaiki kondisi perekonomian mereka dengan bekerja.

4.1.4. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan

Proporsi pekerja dilihat dari lapangan pekerjaan merupakan salah satu indikator untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja, disamping itu juga mencerminkan struktur perekonomian dari suatu wilayah. Jika dilihat dari jenis lapangan pekerjaan utama maka sektor pertanian tetap merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja selama periode 2010 – 2013 yang kemudian diikuti oleh sektor perdagangan dan sektor industri.

Selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, sumbangan sektor pertanian terhadap penyerapan kerja masih yang terbesar walaupun dari tahun ke tahun persentasenya mengalami penurunan. Penyerapan tenaga kerja untuk tahun 2013 di sektor pertanian mulai beranjak naik yaitu sebesar 37,90% dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu sebesar 36,96%. Walaupun kenaikannya hanya sedikit namun ini dimungkinkan karena masyarakat mulai berkeinginan berkarya kembali di sektor pertanian, mengingat saat ini kondisi lahan pertanian yang kurang subur dan semakin menyempit. Masyarakat mulai berfikir dengan kemampuan teknologi di bidang pertanian yang mereka miliki berusaha membuat lahan pertanian dengan kondisi seperti saat ini menjadi lahan yang subur dan produktif.

Sektor-sektor lainnya yang juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012 adalah sektor industri dan sektor lainnya. Orang yang bekerja di sektor industri pada tahun 2013 mencapai 16,08% dari seluruh tenaga kerja dan sektor lainnya mencapai 13,95%. Sektor industri ini adalah sektor yang konsisten tetap beranjak naik setelah keterpurukannya pada saat krisis ekonomi di Indonesia.

Tabel 4.3
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan
di Kabupaten Magelang, 2009 – 2013

Usaha	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	41,87	45,31	41,56	36,96	37,90
Perdagangan	18,07	17,68	20,41	19,33	18,64
Industri	12,67	14,79	11,96	15,27	16,08
Jasa	14,62	11,92	14,36	15,53	13,43
Lainnya	12,77	10,30	11,71	12,91	13,95
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

Perkembangan daya tampung sektor perdagangan dan sektor jasa terhadap tenaga kerja dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 cukup fluktuatif. Ini dikarenakan sektor perdagangan dan sektor jasa merupakan sektor informal yang mudah dimasuki dan ditinggalkan oleh tenaga kerja. Masuk dan keluarnya tenaga kerja di sektor ini tergantung sekali terhadap sosial budaya masyarakat yang sedang berkembang. Dari tabel 4.3 diatas tercatat bahwa sumbangan sektor perdagangan terhadap penyerapan tenaga kerja tahun 2013 sebesar 18,64% dan sektor jasa sebesar 13,43%.

4.1.5. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama menggambarkan perkembangan tenaga kerja terhadap tingkat kemandirian dan tingkat kebutuhannya terhadap tenaga orang lain. Hal itu dimungkinkan karena penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama dalam analisisnya meliputi penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap, bekerja dengan dibantu buruh tetap, pekerja berstatus pekerja dibayar/buruh/karyawan, pekerja bebas, dan pekerja tidak dibayar.

Tabel 4.4
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama
di Kabupaten Magelang, 2009 - 2013

Status Pekerjaan Utama	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berusaha Sendiri	17,47	16,58	17,19	16,64	17,14
Berusaha dibantu buruh tdk tetap	25,17	20,48	22,04	19,72	17,76
Berusaha dibantu buruh tetap	1,96	3,05	1,76	2,76	2,74
Buruh/karyawan/pekerja dibayar	32,01	21,29	21,28	25,36	27,39
Pekerja bebas	-	19,13	19,21	18,48	21,02
Pekerja tak dibayar	23,39	19,48	18,51	17,04	13,96
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

Persentase perkembangan penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tetap, terlihat pada tabel 4.4 diatas bahwa dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami fluktuasi walaupun hanya sedikit sekali kenaikan dan penurunannya, ini dimungkinkan karena biasanya orang bekerja dengan berusaha sendiri cenderung tidak konsisten dalam bekerja karena tidak tergantung orang lain. Sementara untuk persentase jumlah penduduk yang bekerja dengan berusaha dibantu buruh tidak tetap dan pekerja tidak dibayar dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Kondisi ini dimungkinkan karena biasanya mereka yang menjadi buruh tidak tetap dan pekerja tidak dibayar cenderung mulai mencari pekerjaan yang lebih bisa menjamin perekonomian mereka, mungkin dengan berusaha sendiri ataupun menjadi buruh/karyawan tetap.

Kemudian bila dilihat dari persentase penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pekerja dibayar dan penduduk dengan status pekerja bebas dari tahun ke tahun persentasenya dapat dikatakan selalu naik. Walaupun sempat terjadi penurunan jumlah penduduk dengan status sebagai buruh/karyawan/pekerja di bayar yang cukup drastis yakni di tahun 2009 sebesar 32,01% turun menjadi 21,29% di tahun 2010. Ini dimungkinkan adanya pengurangan jumlah karyawan yang cukup besar di sektor-sektor yang terpengaruh akibat kebijakan pemerintah seperti kenaikan

BBM di tahun 2010. Seperti di sektor industri yang kita tahu cukup banyak menyerap tenaga kerja. Tapi seiring berjalannya waktu kondisi ini mulai bisa stabil bahkan cenderung kondisinya membaik.

4.2. Pendidikan

Salah satu indikator dalam keberhasilan pembangunan manusia adalah semakin berkualitasnya pendidikan. Dengan pendidikan yang bagus, kualitas sumber daya manusia semakin meningkat, dan Indonesia khususnya Kabupaten Magelang dengan jumlah penduduk yang besar akan menjadi potensi dengan bekal kualitas pendidikan yang bagus, bukan sebaliknya sebagai beban pembangunan.

Indikator pokok dari keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan adalah terbebasnya masyarakat dari buta huruf. Agar didapat kualitas penduduk yang semakin baik, maka terbebasnya penduduk dari buta huruf saja tidak cukup, perlu ada dorongan kepada masyarakat untuk memperlama masa studinya dibangku sekolah. Dengan demikian diharapkan sumber daya manusia yang cakap mampu diwujudkan untuk mengolah dan memanfaatkan semua potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah dan akhirnya dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan di segala bidang.

4.2.1. Partisipasi Sekolah

Seluruh penduduk Kabupaten Magelang berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk selalu meningkatkan partisipasi sekolah penduduk. Upaya tersebut terus dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai cara dan melalui berbagai sarana yang ada.

Tabel 4.5
Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Magelang, 2009 - 2013

Kelompok Umur	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7 - 12	98,07	98,32	98,70	99,51	99,54
13 - 15	84,83	77,21	89,35	85,30	89,06
16 - 18	49,29	48,02	58,24	58,35	54,13
19 - 24	7,90	6,81	5,32	8,02	17,58

Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

Tingkat kesertaan penduduk dalam pendidikan formal secara umum diukur dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS diartikan sebagai tingkat partisipasi penduduk dalam bersekolah pada kelompok penduduk usia sekolah. APK dapat dibaca sebagai tingkat partisipasi penduduk sekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur tersebut sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut atau tidak. Sedangkan APM adalah tingkat partisipasi penduduk sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dan sesuai dengan kelompok umur jenjang pendidikan tersebut.

Dari tahun 2009 sampai 2013, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun persentasenya selalu meningkat dari 98,07% di tahun 2009 menjadi 99,54% di tahun 2013. Dan APS penduduk usia 13-15 tahun walaupun terjadi fluktuasi namun kecenderungan adanya peningkatan yakni dari 84,83% di tahun 2009 menjadi 89,06% di tahun 2013. Ini membuktikan keberhasilan Pemerintah dengan program pendidikan dasar 9 tahunnya.

Perkembangan APS pada kelompok usia SLTA (16-18 tahun) selama tahun 2009 sampai dengan 2013 juga cukup bervariasi. APS tahun 2009 sebesar 49,29%, turun menjadi 48,02% pada tahun 2010, dan naik di dua tahun berikutnya menjadi 58,24% di tahun 2011 dan 58,35% tahun 2012 dan di tahun 2013 ini kembali turun menjadi 54,13%.

Kelompok usia 19-24 tahun diasumsikan sebagai penduduk yang sedang menempuh jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Di tahun 2013 ini kenaikannya sangat fantastis di bandingkan dengan tahun 2012 dan kenaikannya hingga mencapai 100% lebih. Ini membuktikan kesadaran masyarakat Kabupaten Magelang untuk belajar sampai Perguruan Tinggi sangat bagus.

Tabel 4.6
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
Tingkat SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi Kabupaten Magelang, 2009 - 2013

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)					Angka Partisipasi Murni (APM)				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SD	113,25	112,34	100,56	111,27	111,31	96,89	96,09	88,43	95,89	97,91
SLTP	76,87	75,16	100,15	74,31	82,67	72,66	66,51	71,21	63,64	70,49
SLTA	56,29	51,70	60,22	69,30	53,34	43,71	41,39	47,14	50,47	44,12
PT	9,25	5,41	7,81	10,44	19,25	6,47	3,11	3,99	6,46	15,79

Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Magelang dari tahun 2009 - 2013 seperti pada tabel 4.6 diatas, terlihat bahwa secara umum APK untuk semua jenjang pendidikan terjadi fluktuasi. Untuk APK tahun 2013 bila dibandingkan dengan APK tahun 2012 mengalami peningkatan, hanya pada jenjang pendidikan SLTA yang terjadi penurunan.

Nilai APK untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) di tahun 2013 ini mencapai 111,31% hanya terjadi sedikit kenaikan bila dibanding tahun 2012 yang sebesar 111,27%. Bila dicermati bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir nilai APK selalu diatas 100. Hal ini disebabkan oleh banyaknya penduduk yang usianya bukan kelompok 7-12 tahun (kelompok usia SD) yang bersekolah di SD.

Untuk nilai APK pada jenjang pendidikan SLTP, SLTA dan PT di tahun 2013 ini walaupun dibandingkan dengan tahun 2012 secara umum mengalami peningkatan namun besarnya masih berada di bawah 100%. Ini menunjukkan masih kurangnya jumlah penduduk pada kelompok usia SLTP, SLTA dan PT yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih halus lagi dari angka partisipasi sekolah menurut usia sekolah dibuatlah Angka Partisipasi Murni (APM). APM merupakan proporsi penduduk usia sekolah yang sedang sekolah dengan penduduk usia sekolah. APM SD tahun 2013 sebesar 97,91%, terjadi kenaikan sekitar 2% bila dibanding tahun 2012. APM SD sebesar 97,91% ini dapat diartikan bahwa ada sekitar 97 sampai 98 dari 100 penduduk usia 7-12 tahun yang benar-benar sedang sekolah di jenjang pendidikan sekolah dasar.

Sejalan dengan APM SD yang mengalami kenaikan pada tahun 2013, APM untuk SLTP dan PT pada tahun 2013 juga mengalami kenaikan. APM SLTP pada tahun 2013 sebesar 70,49% dan APM PT sebesar 15,79%. Sedangkan APM SLTA tahun 2013 sebesar 44,12% bila dibandingkan dengan tahun 2012 turun sekitar 5%.

4.2.2. Angka Melek Huruf

Salah satu komponen dalam penghitungan IPM adalah angka melek huruf. Tabel 4.7 menunjukkan bahwa pada tahun 2013, penduduk berusia 10 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin sebesar 44,66%, huruf lainnya sebesar 0,44% dan yang tidak punya kemampuan untuk membaca dan menulis alias buta huruf sebesar 6,63%. Dari tabel yang sama dapat diketahui pula bahwa kemampuan membaca dan menulis penduduk Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun cenderung berfluktuasi.

Tabel 4.7
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut
Kemampuan Membaca dan Menulis dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Magelang, 2009 - 2013

Kemampuan Membaca dan Menulis	Jenis Kelamin	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Huruf Latin	Laki-laki	46,99	58,96	55,06	49,51	47,80
	Perempuan	45,89	53,53	52,38	46,57	41,51
	L+P	46,42	56,21	53,74	48,04	44,66
Huruf Lainnya	Laki-laki	0,64	0,00	0,65	0,46	0,23
	Perempuan	1,46	0,00	1,12	0,47	0,65
	L+P	1,07	0,00	0,88	0,47	0,44
Tidak Mampu	Laki-laki	5,98	5,67	3,73	3,59	3,67
	Perempuan	12,34	11,47	8,43	9,69	9,60
	L+P	9,29	8,61	6,05	6,64	6,63

Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

Apabila dirinci menurut jenis kelamin, kemampuan membaca menulis huruf latin laki-laki lebih besar daripada perempuan, yang berarti kemampuan laki-laki lebih baik daripada perempuan. Pada tahun 2013, ada sekitar 47,80% laki-laki yang mampu membaca dan menulis huruf latin dari total penduduk yang berusia 10 tahun keatas, sementara bagi perempuan yang memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin sebanyak 41,51%.

Persentase kemampuan membaca menulis selain huruf latin untuk penduduk laki-laki sebesar 0,23%, sementara penduduk perempuan sedikit lebih besar yaitu sebesar 0,65% dari total penduduk yang berusia 10 tahun keatas. Dapat dibenarkan untuk mengambil sebuah kesimpulan bahwa kemampuan membaca dan menulis selain huruf latin bagi perempuan lebih tinggi daripada laki-laki.

Dari total penduduk berusia 10 tahun keatas yang buta huruf sebesar 6,63%, 9,60% diantaranya laki-laki dan perempuan sebesar 3,67%. Apabila dua angka tersebut diperbandingkan, maka penduduk perempuan berusia 10 tahun keatas yang buta huruf hampir tiga kali lebih banyak daripada penduduk laki-laki.

4.2.3. Jenjang Pendidikan

Persaingan hidup di era sekarang ini semakin kompetitif karena bangsa yang menguasai teknologi dan informasi yang akan memenangkan kompetisi tersebut. Sebagai bagian dari Bangsa Indonesia, masyarakat Kabupaten Magelang harus menyiapkan sumber daya manusia yang siap menguasai teknologi dan komunikasi. Penguasaan teknologi dan komunikasi hanya dapat dicapai oleh masyarakat yang berpendidikan. Maka dari itu kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan dengan cara meningkatkan jenjang pendidikan masyarakatnya.

Ada pergeseran jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk pada level pendidikan bawah yaitu penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah dan tidak/belum tamat SD/MI. Pada tahun 2013, persentase penduduk pada level bawah ini mengalami kenaikan, dimana kenaikannya menyebabkan penurunan pada level di atasnya. Di mana untuk tahun 2013 ini proporsinya sebesar 27,67%, sementara pada tahun 2011 dan tahun 2012 proporsinya masing-masing mencapai 24,18% dan 24,52%.

Tabel 4.8
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang, 2009 - 2013

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tdk/Belum Pernah Sekolah	6,91	4,88	5,00	4,34	4,19
Tdk/Belum Tamat SD	21,73	18,73	19,18	20,18	23,48
SD/MI	33,53	37,93	36,37	34,45	32,85
SLTP	18,01	20,21	21,67	20,15	18,80
SMU	7,94	7,98	9,31	10,38	11,24
SMK	8,22	7,33	5,43	6,73	5,95
DI/DII	0,96	0,47	0,30	0,56	0,38
DIII/Sarjana Muda	1,25	0,70	1,21	0,99	0,89
DIV/S1/S2/S3	1,44	1,79	1,54	2,23	2,22
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa di Kabupaten Magelang penduduk yang menamatkan SD/MI menempati proporsi tertinggi yakni mencapai lebih dari sepertiga jumlah penduduk. Berikutnya adalah persentase dari penduduk yang tidak/belum tamat SD hampir seperempat dari jumlah penduduk. Kemudian jumlah penduduk yang telah menamatkan jenjang pendidikan setingkat SLTP hampir 20 persen, yakni sebesar 18,80%. Untuk jenjang pendidikan setingkat SMU ada sebesar 11,24% penduduk, bila dibandingkan dengan tahun 2012 terjadi peningkatan.

Dan untuk jenjang lainnya seperti SMK dan PT pada besaran kurang dari 10% dari jumlah penduduk di tahun 2013. Yang cukup menggembirakan bila melihat persentase penduduk berumur 10 tahun keatas yang menamatkan pendidikan sampai PT bahwa dari tahun 2009 sampai dengan 2013 selalu meningkat.

4.2.4. Sarana Sekolah Dan Tenaga Pengajar

Proses belajar mengajar yang baik harus ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Diharapkan dengan semakin baiknya sarana dan prasarana yang disediakan, produk dari hasil proses belajar akan didapatkan kualitas yang baik dan akan berpengaruh pula terhadap kualitas manusia Kabupaten Magelang pada umumnya.

Berdasarkan data Kabupaten Magelang dalam Angka Tahun 2014, jumlah SD di Kabupaten Magelang pada tahun 2013 sebanyak 608 dengan jumlah desa sebanyak 372. Apabila data jumlah SD dirasioikan dengan jumlah desa akan didapat angka 1,6. Angka ini dapat diartikan bahwa ditiap desa rata-rata terdapat 1 sampai 2 SD. Rasio ini akan semakin besar lagi apabila ditambahkan dengan jumlah lembaga pendidikan yang setara dengan SD yang dalam pengelolaannya dibawah Departemen Agama yaitu MI. Jika ditambahkan dengan MI maka diperoleh rasio sebesar 2,64 yang artinya bahwa ditiap desa rata-rata terdapat 2 sampai 3 SD/MI. Keadaan ini menggambarkan bahwa masyarakat sudah sangat mudah untuk mengakses lembaga pendidikan dasar. Mereka tidak perlu keluar dari desa masing-masing untuk sekedar dapat mengenyam pendidikan dasar.

Keterjangkaun/akses ke sekolah yang lebih tinggi dari Sekolah Dasar (SD) biasanya akan lebih sulit. Berdasarkan data Kabupaten Magelang dalam Angka Tahun 2014 jumlah SLTP pada tahun 2013 sebanyak 123, diperoleh rasio jumlah sekolah SLTP dengan jumlah desa sebesar 0,33. Artinya rata-rata tiap 3 atau 4 desa baru akan ada satu sekolah SLTP.

Tabel 4.9
Ratio Murid Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan yang Sedang Diduduki
di Kabupaten Magelang Tahun Ajaran 2013/2014

Jenjang Pendidikan	Kurikulum Diknas	Kurikulum Depag
(1)	(2)	(3)
SD	155	105
SLTP	291	197
SLTA	324	217

Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

Dari tabel ratio murid-sekolah didapat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka ratio murid-sekolah cenderung semakin tinggi. Hal ini dikarenakan sekolah dengan jenjang yang lebih tinggi menerima siswa per-tahunnya cenderung lebih dari satu kelas. Terlihat pula bahwa daya tampung sekolah yang pengelolaannya dibawah pengawasan Diknas lebih tinggi daripada lembaga pendidikan yang pengelolaannya dibawah Depag disemua jenjang pendidikan, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah dan sekolah lanjutan atas.

Dari tabel 4.10, dapat dilihat bahwa rasio murid-guru untuk SD/ sederajat sebesar 13. Artinya tiap 13 siswa SD/ sederajat terdapat satu orang guru. Rasio murid-guru untuk jenjang pendidikan SLTP/ sederajat sama dengan rasio murid-guru untuk SD yaitu 13 sedangkan untuk rasio murid-guru SLTA/ sederajat cenderung lebih rendah. Dimana rasio murid-guru untuk SLTA/ sederajat sebesar 11. Jika dilihat dari besaran-besaran angka rasio murid-guru disemua jenjang pendidikan, maka pencapaiannya dirasa sudah cukup baik. Lebih baik capaiannya dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 4.10
Ratio Murid Guru Menurut Jenjang Pendidikan yang Sedang Diduduki
di Kabupaten Magelang Tahun Ajaran 2013/2014

Jenjang Pendidikan	Dikelola Diknas	Dikelola Depag	Gabungan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	14	12	13
SLTP	14	10	13
SLTA	11	9	11

Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

4.3. Kesehatan

4.3.1. Angka Kesakitan

Angka kesakitan (*morbidity rate*) merupakan indikator yang digunakan mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya, keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Tabel 4.11
Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan yang lalu
Menurut Jumlah Hari Sakit Di Kabupaten Magelang, 2009 - 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Hari Sakit :					
< 4 hari	93,78	94,66	95,76	95,78	94,66
4 – 7 hari	3,98	3,41	2,94	3,26	3,48
8 – 14 hari	0,83	0,67	0,33	0,43	0,76
15 – 21 hari	0,36	0,52	0,38	0,21	0,36
22 – 30 hari	1,05	0,74	0,60	0,31	0,74
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data : Susenas, BPS Kabupaten Magelang

Menurut data Susenas tahun 2013, banyaknya penduduk yang menderita sakit dengan keluhan kesehatan kurang dari 4 hari yaitu sebesar 94,66 persen. Penduduk yang keluhan kesehatannya hilang antara 4 - 7 hari sebesar 3,48 persen dan sebesar 0,76 persen penduduk keluhan kesehatannya hilang antara 8 - 14 hari. Sementara penduduk yang keluhan kesehatannya hilang dalam jangka waktu 15 - 21 hari dan 22 - 30 hari masing-masing sebesar 0,36 persen dan 0,74 persen.

4.3.2. Penolong Persalinan

Tenaga penolong persalinan adalah orang-orang yang memberi pertolongan persalinan selama persalinan berlangsung. Pada dasarnya ada dua jenis tenaga penolong persalinan, yaitu mereka yang mendapat pendidikan formal (tenaga medis), seperti bidan, dokter umum, dokter ahli, dan mereka yang tidak mendapat pendidikan formal melainkan mendapat ketrampilan secara tradisional (tenaga non medis) seperti dukun beranak.

Selama kurun waktu tahun 2009 sampai tahun 2013, persalinan ibu melahirkan di Kabupaten Magelang paling banyak dibantu oleh bidan baru kemudian persalinan

yang dibantu oleh dokter dan yang paling sedikit adalah persalinan ibu yang dibantu oleh dukun. Dari Susenas 2013 pada tabel 4.12 diketahui bahwa persalinan ibu yang dibantu oleh bidan dan dokter naik dibanding keadaan tahun 2012 di mana persalinan yang dibantu oleh bidan naik dari 77,96% menjadi 79,35%, persalinan yang dibantu dokter naik dari 10,02% menjadi 13,23%.

Dengan naiknya persalinan ibu yang dibantu oleh bidan dan dokter maka akan menurunkan persentase persalinan ibu yang dibantu oleh dukun. Beralihnya penolong kelahiran dari dukun ke bidan mungkin salah satu penyebabnya adalah program bidan desa. Dimana dengan adanya bidan yang ada di desa, maka penduduk desa semakin mudah untuk mengakses penolong kelahiran oleh tenaga medis.

Kadang suatu proses kelahiran tidak hanya dibantu oleh salah satu profesi saja, misalnya dukun saja atau bidan saja. Pada proses kelahiran yang cukup sulit, biasanya penanganan kelahiran akan dilimpahkan kepada profesi tertentu yang dipercayai oleh si ibu yang melahirkan ataupun keluarganya agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Terhadap kemungkinan tersebut, BPS dalam surveinya membagi tahapan penolong kelahiran dengan 2 tahap. Penolong kelahiran pertama yang dimaksudkan adalah penolong kelahiran yang dihubungi oleh keluarga pertama kali sejak tanda-tanda kelahiran janin sudah dirasakan oleh ibu hamil (*suatu tahapan proses kelahiran dimana si ibu dibawa pertama kali untuk pertolongan kelahiran*). Penolong kelahiran terakhir merupakan orang yang dimintai bantuannya oleh keluarga ibu melahirkan untuk menyelesaikan proses kelahiran (*saat dimana si bayi lahir*). Dari data yang dikumpulkan BPS tersebut, ternyata ada perbedaan antara penolong kelahiran tahap pertama dengan penolong kelahiran tahap kedua. Data menunjukkan bahwa proses peralihan penolong kelahiran tahap satu ke tahap dua diambilkan dari tenaga non medis ke tenaga medis atau dari tenaga medis dilimpahkan kepada tenaga medis lainnya yang lebih profesional.

Tabel 4.12
Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama dan Terakhir
Di Kabupaten Magelang, 2009 - 2013

Penolong Kelahiran	Penolong Kelahiran Pertama					Penolong Kelahiran Terakhir				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Dokter	8,48	12,73	12,78	10,02	13,23	10,38	17,85	11,46	8,87	15,65
Bidan	70,52	67,73	71,78	77,96	79,35	71,08	71,22	74,39	79,58	73,65
Tenaga Medis Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
Dukun	21,00	18,60	14,91	11,50	7,42	18,55	10,59	13,62	11,03	10,05
Famili dan Lainnya	0,00	0,94	0,54	0,52	0,00	0,00	0,34	0,54	0,52	0,00
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data : Susenas, BPS Kabupaten Magelang

Biladilihat pada tabel diatas untuk penolong kelahiran terakhir, terlihat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis terutama dokter tetap bagus. Terbukti dari tabel tersebut bahwa persentase penolong persalinan ibu yang tertinggi di tahun 2013 ini adalah dokter yang kenaikannya hampir duakali lipat dibandingkan dengan tahun 2012.

4.3.3. Pemberian Asi

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan terbaik untuk bayi, karena di dalam ASI mengandung semua zat makanan yang dibutuhkan bayi. Dengan pemberian ASI dapat meningkatkan imunitas bayi dan meningkatkan tingkat kecerdasannya. Selain itu, terjadinya sentuhan antara ibu dan bayi disaat menyusui akan meningkatkan rasa kasih sayang dan memberikan rasa aman dan nyaman untuk bayi. Ada dua hal pokok yang disarankan dalam pemberian ASI. Pertama: Asi sebaiknya diberikan pada anak hingga anak mencapai usia dua tahun untuk kemudian dihentikan (disapih). Kedua: selama enam bulan pertama, si bayi sebaiknya diberikan ASI saja tanpa makanan tambahan (ASI eksklusif).

Tabel 4.13
Persentase Pemberian ASI pada Balita Usia 0-4 tahun yang Pernah Disusui
Dan Lamanya Disusui (bulan) di Kabupaten Magelang, 2009 - 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Balita yang pernah disusui	94,32	98,29	95,53	97,18	94,81
Lamanya disusui					
a. < 24 bulan	66,71	66,74	64,52	64,31	63,17
b. 24 bulan lebih	33,29	33,26	35,48	35,69	36,83
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas, BPS Kabupaten Magelang

Berdasarkan data Susenas seperti pada tabel diatas, dari tahun 2009 - 2013 ini persentase balita berusia 0 - 4 tahun yang pernah disusui mengalami fluktuasi. Sementara bila dilihat pada pemberian ASI pada balita yang disusui kurang dari 24 bulan menunjukkan persentase yang semakin kecil/menurun. Sedangkan balita yang disusui lebih dari 24 bulan menunjukkan persentase yang terus meningkat.

4.3.4. Fertilitas Dan Partisipasi Keluarga Berencana

Penduduk yang berkualitas merupakan modal awal suatu pembangunan. Namun seperti kita ketahui, masalah kependudukan yang tidak pernah ada habisnya masih menjadi perhatian pemerintah dan bangsa ini. Salah satu masalah yang menjadi perhatian utama pemerintah dalam beberapa tahun belakangan ini adalah laju pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan penduduk perlu dikendalikan. Pertambahan penduduk yang tidak terkendali akan menyulitkan pemerintah dalam penyediaan pangan, sandang, perumahan, fasilitas kesehatan, penyediaan lapangan pekerjaan dan bidang-bidang lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan adanya penambahan penduduk. Salah satu instrumen untuk mengetahui sejak dini kemungkinan adanya pertumbuhan penduduk adalah dengan mengetahui indikator fertilitas. Beberapa

indikator fertilitas yang bisa ditampilkan pada analisa kali ini antara lain umur perkawinan pertama, banyaknya anak lahir hidup dari wanita yang pernah kawin dan banyaknya anak yang masih hidup.

Tabel 4.14
Indikator Fertilitas di Kabupaten Magelang, 2009 - 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umur Perkawinan Pertama Wanita (persentase) :	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
a. < 17 tahun	18,41	19,24	14,01	13,81	17,94
b. 17-18 tahun	23,33	25,65	23,57	21,58	23,94
c. 19-24 tahun	44,57	42,10	51,67	49,40	44,94
d. 25 tahun ke atas	13,69	13,02	10,75	15,22	13,18
Rata-rata Anak Lahir Hidup (ALH) dari Wanita Pernah Kawin (15-49) Tahun	2,17	2,18	2,08	2,04	2,05
Rata-rata Anak Masih Hidup (AMH) dari Wanita Pernah Kawin (15-49) Tahun	2,06	2,06	2,02	1,95	1,98

Sumber : Susenas, BPS Kabupaten Magelang

Umur perkawinan pertama yang terlalu dini menyebabkan percepatan pertumbuhan penduduk. Semakin muda usia pada saat melangsungkan perkawinan pertama kali, maka semakin lama panjang waktu yang dimungkinkan untuk hamil/melahirkan. Selain itu, wanita yang kawin pada usia yang sangat muda mempunyai resiko yang cukup besar pada saat mengandung dan melahirkan serta berdampak pada kesehatan ibu dan anak.

Data yang diperoleh dari hasil Susenas 2013 menyebutkan bahwa perkawinan pertama pada wanita usia kurang dari 17 tahun (17,94%) dan pada kelompok usia 17 – 18 tahun (23,94%), bila dibandingkan dengan tahun 2012 terjadi kenaikan. Dan terjadi penurunan pada kelompok usia 19-24 tahun (44,94%) dan kelompok usia 25 tahun keatas (13,18%). Ada tambahan pekerjaan rumah untuk Pemerintah sehingga dapat menekan angka perkawinan pertama pada usia dibawah 18 tahun.

Diperlukan kecermatan untuk mengamati laju pertumbuhan banyaknya anak lahir hidup. Sebab banyaknya anak lahir hidup dari wanita pernah kawin pada wanita yang masih produktif (usia 15-49 tahun) dari tahun 2009 sampai tahun 2012 cenderung menurun tapi di tahun 2013 angkanya mulai beranjak naik walaupun kenaikannya hanya sedikit. Tetapi bila angkanya dibulatkan menjadi 0 digit dibelakang koma, rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup masih disekitar 2 anak per wanita produktif. Angka tersebut masih dalam batas program pemerintah yaitu cukup 2 anak dalam satu pasangan hidup.

Partisipasi penduduk terhadap program Keluarga Berencana (KB) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka program pengendalian jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap angka kelahiran. Partisipasi KB atau penduduk yang pernah KB dari wanita pernah kawin usia 15-49 tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2009 sebanyak 77,57% wanita usia tersebut pernah ikut proram KB. Tahun 2010 partisipasinya turun menjadi 75,78%. Kemudian pada tahun 2011 angka partisipasinya naik menjadi 84,28% dan di tahun 2012 turun kembali menjadi 83,81%, dan untuk tahun 2013 kembali naik sebesar 84,82%.

Perkembangan penduduk usia 15-49 tahun yang sedang ber-KB dari tahun 2009-2013 terjadi fluktuasi. Untuk tahun 2013 ini persentase penduduk wanita usia 15-49 tahun dengan partisipasi KBnya sebesar 84,82% terhadap total penduduk wanita usia, 15-49 tahun, 77,54% sedang memakai KB dan 22,46% sisanya tidak mamakai KB lagi.

Tabel 4.15
Indikator Keluarga Berencana (KB) Wanita Berumur 15-49 Tahun,
Pernah Kawin dan Pernah/Tidaknya Menggunakan Alat/Cara KB
di Kabupaten Magelang, 2009 - 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Partisipasi KB (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
a. Pernah memakai	77,57	75,78	84,28	83,81	84,82
b. Tdk pernah memakai	22,43	24,22	15,72	16,19	15,18
Yang pernah memakai (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
a. Sedang memakai KB	76,11	78,91	78,43	80,23	77,54
b. Tdk memakai KB lagi	23,89	21,09	21,57	19,77	22,46
Alat Kontrasepsi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
a. MOW/Tubektomi	5,77	7,53	2,83	4,19	4,26
b. MOP/Vasektomi	0,65	1,45	0,46	0,82	0,92
c. AKDR/IUD	18,21	15,41	13,68	16,12	17,49
d. Suntikan KB	55,54	53,48	57,12	48,94	47,70
e. Susuk KB	6,66	8,22	9,15	7,98	11,77
f. Pil KB	11,79	13,27	14,26	16,55	16,02
g. Kondom	1,06	0,23	1,77	0,77	0,66
h. Intravag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i. Kondom Wanita	0,00	0,00	0,23	0,00	0,46
j. Tradisional	0,32	0,41	0,48	4,62	0,72

Sumber : BPS Kabupaten Magelang

Jika dilihat dari pemakaian alat kontrasepsi, jenis alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntikan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penggunaan alat KB suntik mencapai persentase yang cukup tinggi yaitu berada pada kisaran 50%. Pada tahun 2013, dari sebanyak 77,54% wanita subur yang sedang menggunakan alat kontrasepsi, 47,70% adalah pengguna alat kontrasepsi suntikan. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 48,94%.

Alat kontrasepsi lain yang cukup diminati adalah AKDR/IUD dan Pil KB masing-masing digunakan oleh pengguna alat KB sebesar 17,49% dan 16,02%. Kemudian pengguna susuk KB ada sebesar 11,77% pengguna susuk ini bila dibandingkan tahun

sebelumnya mengalami kenaikan hampir 50%, di mana tahun 2012 sebesar 7,98%. Untuk pengguna alat kontrasepsi yang lainnya persentase kecil sekali dan berada dibawah 5% seperti MOW/Tubektomi (4,26%), MOP/vasektomi (0,92%), kondom (0,66%), kondom wanita (0,46%), dan KB tradisional (0,72%). Untuk tahun 2013 ini pengguna KB dengan cara tradisional bila dibandingkan dengan tahun 2012 besarnya sangat menurun yaitu dari 4,62% di tahun 2012 menjadi 0,72% di tahun 2013. Ini dimungkinkan pengguna KB cara tradisional ini berfikir agak repot penggunaannya walaupun dari segi biaya akan lebih murah.

Dari semua alat kontrasepsi yang ditawarkan kepada masyarakat, ternyata pengguna terbesar adalah wanita. Hal ini bisa dilihat dari jenis-jenis alat kontrasepsi yang digunakan oleh mayoritas penduduk. Pada tahun 2013, kondom dan MOP/vasektomi yang penggunaannya adalah kaum pria persentasenya jika dijumlahkan hanya 1,58%. Hal ini berarti bahwa 98,42% sisa penggunaannya adalah kaum wanita.

4.4. Perumahan

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga adalah fasilitas perumahan yang dimiliki oleh penduduknya. Arti fisik perumahan dalam konteks yang diperluas disebut pemukiman. Pemukiman yaitu tempat tinggal anggota masyarakat dan individu-individu yang biasanya hidup dalam ikatan perkawinan atau keluarga beserta berbagai fasilitas pendukungnya. Perumahan menjadi tempat tumbuh, hidup, berinteraksi, perlindungan dari gangguan dan fungsi lainnya bagi penghuninya. Dengan demikian semakin tinggi status sosial ekonomi, keadaan rumah semakin lengkap dan bermutu baik. Lengkap dalam arti fasilitas yang dimiliki rumah tersebut seperti listrik, air, jaringan drainase, telepon, serta sistem pembuangan kotoran semuanya tersedia.

Secara umum, kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan dari penghuninya. Oleh karena itu aspek kesehatan dan kenyamanan bahkan keindahan bagi sebagian masyarakat tertentu akan sangat menentukan pemilihan rumah tinggal

mereka dan hal tersebut berkaitan dengan kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas rumah tinggal, tingkat kesejahteraan dapat juga digambarkan dengan fasilitas rumah tinggal yang digunakan sehari-hari. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi para penghuninya.

Indikator ini menunjukkan kualitas dan kuantitas tempat tinggal yang dikuasai baik milik sendiri maupun bukan. Fisik bangunan yang kuat dan terbuat dari bahan yang tidak membahayakan, menjamin keamanan penghuni tidak saja dari ancaman kriminal tetapi juga dari kerentanan bangunan itu sendiri dan kemungkinan terserang penyakit. Fisik bangunan yang kuat ditentukan oleh pemilihan bahan komponen bangunan yaitu lantai, dinding, dan atap. Sementara kenyamanan dan kesehatan penghuni selain mengharuskan pemilihan bahan bangunan yang baik juga luas lantai yang memadai.

Menurut data Susenas tahun 2013 seperti tersebut pada tabel 4.16, persentase rumah tangga yang menempati luas bangunan tempat tinggal dengan luas 50-99 m² dari tahun 2009-2013 hampir mencapai 60% bahkan di tahun 2011 mrncapai 64,83%, dan untuk tahun 2013 ini sebesar 56,90%. Rumah tangga yang menempati bangunan dengan luas kurang dari 50 m² dan dengan luas 100-149 m² mencapai hampir 20%. Dan rumah tangga dengan luas lantai lebih dari 150 m² besarnya kurang dari 10%, dan tahun ini walaupun meningkat dibanding tahun 2012 namun besarnya hanya 6,69%.

Tabel 4.16
Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal
di Kabupaten Magelang, 2009 - 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Luas Lantai (m²) :					
a. < 50	18,37	16,91	15,83	16,53	18,65
b. 50 - 99	55,16	58,51	64,83	58,47	56,90
c. 100 - 149	16,89	18,07	14,10	19,39	17,76
d. > 150	9,57	6,52	5,23	5,61	6,69
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Magelang

Jenis lantai dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kualitas perumahan. Semakin baik kualitas lantai perumahan dapat diasumsikan semakin membaik tingkat kesejahteraan penduduknya. Selain itu, jenis lantai juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Semakin banyak rumah tangga yang mendiami rumah dengan lantai tanah akan berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dikarenakan lantai tanah dapat menjadi media yang subur bagi timbulnya kuman penyakit dan media penularan bagi jenis penyakit tertentu, seperti penyakit diare, cacangan dan penyakit kulit.

Tabel 4.17
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum
di Kabupaten Magelang, 2009 - 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumber Air Minum					
a. Air dalam kemasan	0,29	0,36	0,72	0,51	2,48
b. Ledeng	12,66	13,30	15,77	18,66	14,16
c. Pompa	5,76	6,94	7,06	7,63	7,83
d. Sumur	43,13	41,03	38,01	33,28	41,22
e. Mata Air	38,16	38,37	38,44	39,88	34,31
f. Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Magelang

Persentase rumah tangga menurut sumber air minum seperti pada tabel 4.17 diatas menyebutkan bahwa rumah tangga yang menggunakan air sebagai sumber air minum terbanyak adalah berasal dari sumur yakni mencapai 41,22%. Angka ini naik sekitar 7% dibanding pada tahun 2012 (33,28%). Penggunaan air minum setelah sumur, mata air menjadi sumber air minum yang banyak dipakai oleh rumah tangga, untuk tahun 2013 ini sebanyak 34,31%. Apabila kedua persentase tersebut dijumlahkan maka sudah didapatkan angka 75,53%. Artinya mata air dan sumur sudah dipakai oleh sekitar $\frac{3}{4}$ jumlah penduduk Kabupaten Magelang sebagai sumber air minum. Setelah sumur dan mata air, ledeng sebagai sumber air minum juga banyak digunakan, yakni sebesar 14,16%. Dan penggunaan air sebagai sumber air minum seperti pompa dan air dalam kemasan persentasenya tidak lebih dari 10%.

Tabel 4.18
Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar
di Kabupaten Magelang, 2009 - 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fasilitas Tempat Buang Air Besar					
a. Sendiri	62,36	60,82	62,07	67,25	70,06
b. Bersama	8,72	7,54	10,09	10,43	5,86
c. Umum	5,82	8,94	5,93	6,10	7,27
d. Tidak Ada	23,10	22,70	21,91	16,21	16,81
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Magelang

Semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat Kabupaten Magelang tentang pentingnya kondisi lingkungan yang sehat. Salah satu hal yang mendukung kondisi tersebut yaitu dengan semakin meningkatnya persentase rumah tangga yang mempunyai tempat buang air besar sendiri dan semakin menurunnya persentase rumah tangga yang memanfaatkan tempat BAB bersama. Persentase rumah tangga pengguna tempat BAB sendiri pada tahun 2013 sebesar 70,06%, naik sekitar 3% dibanding keadaan tahun 2012 (67,25%).

Bab V Kesimpulan dan Saran

1. IPM adalah variabel tak bebas yang bersifat *state*, yaitu sebuah variabel yang perubahannya berlangsung sangat lambat dan akan meningkat/menurun sedikit demi sedikit sebagai respon terhadap perubahan berbagai kondisi fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Tidaklah mungkin mengubah tingkat IPM secara bermakna melalui program/proyek yang hanya bersifat temporer. Perencanaan pembangunan manusia yang dibuat seyogyanya mengacu pada kebijakan jangka panjang secara sistematis.
2. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magelang Tahun 2013 sebesar 73,67 persen, walaupun lebih rendah dibanding IPM Jawa Tengah (74,05%) namun menempati peringkat ke-4 se-karesidenan Kedu dan se-Jawa Tengah pada peringkat ke-18. Peringkat yang cukup membanggakan tapi diusahakan agar bisa ditingkatkan.
3. Angka Harapan Hidup Masyarakat Kabupaten Magelang tahun 2013 sebesar 70,63 persen. Lebih rendah dibanding angka harapan hidup Jawa Tengah (71,97%) namun bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain se-Karesidenan Kedu maka menempati peringkat yang ke-4.
4. Angka melek huruf masyarakat Kabupaten Magelang tahun 2013 sebesar 93,64 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka Jawa Tengah. Dimana angka melek huruf masyarakat Provinsi Jawa Tengah sebesar 91,71 persen dan pada tingkat Karesidenan Kedu terbaik ketiga.
5. Rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Magelang tahun 2013 sebesar 7,55 tahun. Dengan kata lain rata-rata masyarakat Kabupaten Magelang telah menempuh pendidikan selama 7,55 tahun atau setara menduduki bangku kelas 1 (satu) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan angka Jawa Tengah (rata-rata lama sekolah untuk Jawa Tengah sebesar 7,43 tahun).

